



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 231 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow; dan untuk menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

M1

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1032);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Tipe A Kabupaten Bolaang Mongondow (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 39);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 43);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Program Kerja Pengawasan Berbasis Risiko Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 55);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

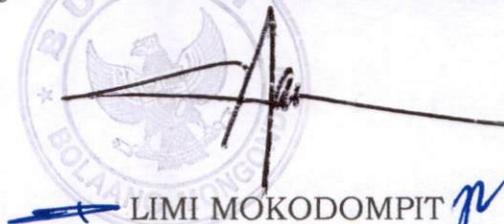
Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan PKPT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow menyampaikan laporan kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 3 Mei 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT 

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	INSPEKTUR DAERAH	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 237 TAHUN 2024

TANGGAL : 3 Mei 2024

TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS
RISIKO INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN 2024

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2024**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat sebagai unit kerja dengan fungsi pengawasan internal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis dan terpadu. Reformasi mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) sehingga penyelenggaraan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan inspektorat dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan pemerintah (*Assurance activities*), memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anti corruption activities*) dan memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

Guna mewujudkan kondisi tersebut maka disusunlah Program Kerja Pengawasan Tahunan PKPT Tahun 2024 sebagai acuan/pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam satu tahun kedepan

sehingga kegiatan Inspektorat dapat berjalan dengan tertib, terencana, terkoordinasi dan tidak tumpang tindih

B. TUJUAN DAN SASARAN

PKPT Tahun 2024 mengatur :

1. KEGIATAN PENGAWASAN

- a) Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP
- b) Kegiatan Asistensi/Pendampingan
- c) Kegiatan Reviu
- d) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi; dan
- e) Kegiatan Pemeriksaan/Audit

2. SASARAN PENGAWASAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dari PKPT Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 ini adalah Pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah.

3. RUANG LINGKUP

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan ruang lingkup:

- 1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2024 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, seperti:
 - a. pengendalian inflasi daerah;
 - b. kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
 - c. tingkat pengangguran terbuka;
 - d. investasi dan pelayanan publik dan/atau
 - e. penanganan stunting.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau

b. pemeriksaan kinerja.

2) Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

c. Reviu Laporan Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintahan Keuangan

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

3) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan integritas.

4) Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

4. PELAKSANAAN PKPT TAHUN 2024

a) Pendekatan Pemeriksaan

Pemeriksaan Reguler Tematik dilaksanakan secara menyeluruh terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efisiensi penggunaan sumber daya dan efektifitas dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, penggunaan sumber daya melalui pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik kegiatan, pengujian data, analisis prosedur, analisis hasil dan analisis kualitatif serta pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Inspektorat juga melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan publik, pelaksanaan program-program Bupati dan Wakil Bupati, pemeriksaan terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme serta pengaduan masyarakat yang dilakukan secara menyeluruh terhadap kasus yang terjadi yang meliputi penyebab, objek yang menjadi kasus, akibat, siapa yang terlibat dan aspek lain yang terkait dengan kasus yang terjadi.

b) Karakteristik Tugas Pengawasan

Tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat kabupaten Bolaang Mongondow memiliki karakteristik sebagai berikut :

A. Program Pengawasan yang menjadi Mandatory :

1. Reviu RKPD
2. Reviu Renja PD
3. Reviu KUA-PPAS
4. Reviu RKA-SKPD
5. Reviu DAK, DAU
6. Pemeriksaan akuntabilitas pengelolaan Pendapatan Daerah
7. Pemeriksaan akuntabilitas pengelolaan Belanja Daerah
8. Pemeriksaan Pengelolaan Pembiayaan Daerah
9. Pemeriksaan Pengelolaan Kas dan Persediaan
10. Pemeriksaan Kualitas Pengelolaan BMD
11. Reviu Laporan Keuangan
12. Probitiy Audit Pengadaan Barang dan Jasa
13. Reviu LKJiP
14. Evaluasi SAKIP
15. Reviu LPPD
16. PDTT Perhitungan Keuangan Daerah
17. Reviu Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Gender
(*Responsive Gender*)
18. Pengawasan pengelolaan keuangan Desa
19. Pendampingan Penerapan SPM
20. Audit IT / Pengawasan kualitas pengadaan barang dan jasa
melalui e-Purchasing
21. Monitoring pelaporan LHKPN dan LHKASN
22. Pelaksanaan survei penilaian integritas
23. Penilaian mandiri reformasi birokrasi
24. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi
25. Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan
oleh STRANAS PK
26. Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi
terintegrasi yang di koordinasikan KPK
27. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli)
28. Pemeriksaan Penanganan Pengaduan Masyarakat
29. PDTT : Investigasi/ Pengaduan Masyarakat yang berindikasi
korupsi
30. Monev TLHP BPK serta TLHP APIP
31. Kapabilitas APIP Level 3
32. Maturitas SPIP
33. Implementasi Penerapan Manajemen Risiko

34. Pemenuhan Penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan Minimal 120 Jam per Tahun
35. Evaluasi Penyerapan Anggaran PBJ
36. Reviu P3DN
37. Audit Kinerja atas Pengendalian Inflasi daerah, kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, dan Pendampingan Pemeriksaan BPK RI
38. Evaluasi Benturan Kepentingan dan Rotasi Mutasi Promosi ASN
39. Pengawasan dalam rangka Pemenuhan MCP
40. Pendampingan Pemeriksaan BPK RI
41. Pengawasan Dana Bos
42. Pengawasan Puskesmas
43. Pengawasan PDAM
44. Penilaian Kinerja SKPD Terintegrasi (Akselerasi)
45. Reviu Mandatory lainnya (Dana Alokasi Umum, PNPM, MCP dll)

B. Program Pengawasan Berdasarkan Risiko :

1. Audit PBJ dan Reviu Program Pengelolaan Pendidikan
2. Audit PBJ dan Reviu Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
3. Audit PBJ dan Reviu Program Pembinaan Perpustakaan
4. Audit PBJ dan Reviu Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
5. Evaluasi Program Perlindungan Perempuan
6. Evaluasi Program Peningkatan Kualitas Keluarga
7. Evaluasi Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
8. Audit PBJ Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
9. Audit PBJ dan Reviu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
10. Audit PBJ dan Reviu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
11. Audit PBJ dan Reviu Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman.

12. Audit PBJ dan Reviu Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan.
13. Audit PBJ dan Reviu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
14. Reviu Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
15. Reviu Program Pembinaan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
16. Audit Ketaatan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
17. Audit Ketaatan Program peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
18. Audit Ketaatan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
19. Audit PBJ Program Perekonomian dan Pembangunan.
20. Audit Ketaatan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
21. Audit PBJ dan Reviu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
22. Audit PBJ dan Reviu Program Pengelolaan dan Pengembangan Drainase.
23. Audit PBJ dan Reviu Program Penyelenggaraan Jalan.
24. Audit PBJ dan Reviu Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
25. Audit PBJ dan Reviu Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
26. Audit PBJ dan Reviu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
27. Audit PBJ dan Reviu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
28. Audit PBJ dan Reviu Program Kawasan Pemukiman.
29. Audit PBJ dan Reviu Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.
30. Audit PBJ dan Reviu Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
31. Audit PBJ Program Penanggulangan Bencana.
32. Audit Ketaatan Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan.
33. Audit Ketaatan Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

34. Audit Ketaatan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
35. Audit Ketaatan Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
36. Audit Ketaatan Program Pengembangan Ekspor.
37. Audit Ketaatan Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.
38. Audit Ketaatan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
39. Audit Ketaatan Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam.
40. Audit Ketaatan Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
41. Audit Ketaatan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
42. Audit Kinerja/Reviu Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
43. Audit Ketaatan Program Peningkatan Kerjasama Desa.
44. Audit Ketaatan Program Administrasi Pemerintahan Desa.
45. Audit Ketaatan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
46. Program Pendaftaran Penduduk.
47. Audit Ketaatan Program Pencatatan Sipil.
48. Audit Ketaatan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
49. Audit Kinerja Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.
50. Audit Kinerja Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
51. Audit Kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektor.
52. Audit Ketaatan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
53. Audit Ketaatan Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
54. Audit Ketaatan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
55. Audit Ketaatan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
56. Audit Kinerja Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.
57. Audit Kinerja Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

58. Audit Kinerja Program Penanganan Kerawanan Pangan.
59. Audit Kinerja Program Pengawasan Keamanan Pangan.
60. Audit Kinerja/Reviu Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
61. Audit Kinerja/reviu Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

c). Objek Pengawasan

1	Dinas-Dinas	24 obrik
2	Badan	5 obrik
3	Kantor	2 obrik
4	Sekretariat Daerah/Bagian	10 obrik
5	Sekretariat Dewan	1 obrik
6	Kecamatan	15 obrik
7	Desa/Kelurahan	202 obrik
8	Puskesmas	18 obrik
9	SMP Negeri/Swasta	48 obrik
10	SD Negeri/Swasta	203 obrik
11	Penerima Bansos & Hibah yang diambil sampel	1 obrik
12	Badan Usaha Milik Daerah	1 obrik

d). Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Bolaang Mongondow, struktur organisasi Inspektorat adalah:

1. Inspektur
2. Sekretariat, yang membawahi:
3. Sub Bagian Program dan Perencanaan;
4. Sub. Bagian Keuangan dan Evaluasi Program; dan
5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
6. Inspektur Pembantu Wilayah I, yang membawakan Auditor
7. Inspektur Pembantu Wilayah II, yang membawakan auditor;

8. Inspektur Pembantu Wilayah III, yang membawakan auditor;
9. Inspektur Pembantu Wilayah IV, yang membawakan auditor ;
dan
10. Inspektur Pembantu Wilayah V, yang membawakan auditor
11. Kelompok Jabatan Fungsional

e) Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah tenaga pengawas untuk melaksanakan tugas pengawasan serta tugas kesekretariatan pada Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai berikut:

a. Inspektur	1 orang
b. Sekretaris	1 orang
c. Inspektur Pembantu	5 orang
d. Kepala Sub Bagian	2 orang
e. Staf Administrasi:	
- Bersertifikat JFA	- orang
- Bersertifikat P2UPD	- orang
- Bersertifikat Audiwan	- orang
- Belum bersertifikat JFA	- orang
f. Tenaga Pengawas	
- Bersertifikat JFA	21 orang
- Bersertifikat P2UPD	6 orang
- Bersertifikat Auditor	
Kepegawaian .	- orang

f) Anggaran

Tahun anggaran 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow memperoleh alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar Rp.14.728.692.696,- untuk melaksanakan 3 program, dengan rincian sebagai berikut :

NO	OPD	SUMBER DANA	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA		Rp 6.555.920.388	Rp 2.944.853.732	Rp 750.135.780	Rp 10.250.909.900
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DAU	Rp 6.518.790.388	-	-	Rp 6.518.790.388
	Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	DAU	Rp 37.130.000	-	-	Rp 37.130.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DAU	-	Rp 1.637.052.198	-	Rp 1.637.052.198
	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	DAU	-	Rp 45.342.600	-	Rp 45.342.600
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DAU	-	Rp 19.879.523	-	Rp 19.879.523
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DAU	-	Rp 81.768.381	-	Rp 81.768.381
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DAU	-	Rp 77.528.641	-	Rp 77.528.641
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DAU	-	Rp 463.482.885	-	Rp 463.482.885
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DAU	-	-	Rp 702.075.000	Rp 702.075.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DAU	-	-	Rp 48.060.780	Rp 48.060.780
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	DAU	-	Rp 40.831.872	-	Rp 40.831.872
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DAU	-	Rp 189.000.000	-	Rp 189.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DAU	-	Rp 185.641.922	-	Rp 185.641.922
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DAU	-	Rp 15.056.110	-	Rp 15.056.110
	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DAU	-	Rp 189.269.600	-	Rp 189.269.600
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		-	Rp 3.975.843.270	-	Rp 3.975.843.270
	Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah	DAU	-	Rp 666.501.000	-	Rp 666.501.000
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	DAU	-	Rp 219.500.000	-	Rp 219.500.000
	Reviu Laporan Kinerja	DAU	-	Rp 482.100.000	-	Rp 482.100.000
	Reviu Laporan Keuangan	DAU	-	Rp 205.212.000	-	Rp 205.212.000
	Pengawasan Desa	DAU	-	Rp 300.001.686	-	Rp 300.001.686
	Kerjasama Pengawasan Internal	DAU	-	Rp 1.241.533.632	-	Rp 1.241.533.632
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	DAU	-	Rp 311.437.626	-	Rp 311.437.626
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	DAU	-	Rp 169.111.326	-	Rp 169.111.326
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	DAU	-	Rp 380.446.000	-	Rp 380.446.000
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		-	Rp 501.939.526	-	Rp 501.939.526
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	DAU	-	Rp 501.939.526	-	Rp 501.939.526
	JUMLAH		Rp 6.555.920.388	Rp 7.422.636.528	Rp 750.135.780	Rp 14.728.692.696

g) Pelaporan dan Tindak Lanjut

1) Pelaporan

Output dari kegiatan pemeriksaan adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Laporan harus disusun secara objektif, yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada saat pemeriksaan, dan rasional yaitu ada hubungan yang rasional antara temuan, penyebab dan rekomendasi, sehingga obrik dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja Perangkat Daerah/unit kerjanya. Untuk itu LHP harus :

- dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat yang memberi perintah serta pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- dibuat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesainya kegiatan atau pelaksanaan pemeriksaan dan segera disampaikan kepada yang berkepentingan secara tepat waktu. Hal ini dimaksudkan agar temuan dari hasil pemeriksaan tidak menjadi temuan yang basi, sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terperiksa sesuai dengan apa yang direkomendasikan;
- disusun berdasarkan informasi dan data yang valid serta berdasarkan pada kode etik dan norma pengawasan; dan - laporan harus dapat menilai daya guna & hasil guna.

2. Sistematika Penulisan LHP

Sistematika penulisan LHP didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut

Setiap Perangkat Daerah yang menjadi Obrik wajib melaksanakan tindak lanjut dari temuan hasil pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan dalam LHP. Pelaksanaan tindak lanjut maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya LHP oleh Obrik. Pelaksanaan tindak lanjut harus sesuai dengan rekomendasi dan didukung dengan bukti-bukti yang valid dan sah. Tim Pemeriksa berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap setiap laporan pelaksanaan

tindak lanjut dari Perangkat Daerah yang menjadi Obrik yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk memuktahirkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan sekali, dilaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan, dengan demikian akan dapat diketahui:

- jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan saran/ rekomendasi pemeriksaan;
- jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti tetapi belum sesuai dengan rekomendasi;
- jumlah temuan yang masih dalam proses penyelesaian; dan
- jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti sesuai dengan saran/rekomendasi.

5. PROGRAM PENGAWASAN

Penyusunan PKPT Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow menerapkan manajemen Audit Berbasis Risiko (Risk Based Audit), agar risiko yang dihadapi auditor dapat diminimalkan dan temuan hasil audit dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan dukungan informasi mengenai risiko dalam menetapkan arah kebijakan pengawasan.

Penerapan manajemen audit berbasis risiko dimulai dengan penilaian risiko, yang mencakup idenffikasi risiko dan analisis risiko. Untuk menentukan prioritas objek pengawasan faktor pemilihan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Risiko (merupakan skor dari penilaian risiko sesuai Risk Register yang telah dievaluasi pada lembar pemahaman Audit Universe Program)

No	Klasifikasi Risiko	Skala
1	Risiko Sangat Tinggi	5
2	Risiko Tinggi	4
3	Risiko Sedang	3
4	Risiko Rendah	2
5	Risiko Sangat Rendah	1

2. Keuangan (adalah faktor pemilihan berdasar besaran anggaran Program dibandingkan besaran anggaran OPD yang bersangkutan)

No	Jumlah	Skala
1	s.d 5% dari anggaran OPD	1
2	5,1 - 10% dari anggaran OPD	2
3	10,1 - 15% dari anggaran OPD	3
4	15,1 - 20% dari anggaran OPD	4
5	20,1% ke atas dari anggaran OPD	5

3. Faktor Kunci Keberhasilan KSF

No	Nilai LKIP	Skala
1	Bagian Tidak Penting	1
2	Bagian Kurang Penting	2
3	Bagian Penting	3
4	Bagian Sangat Penting	4
5	Faktor Utama	5

4. Dampak Kepada Masyarakat

Jumlah	Skala
Tidak Berdampak	1
Berdampak Kecil	2
Berdampak Sedang	3
Berdampak Tinggi	4
Berdampak sangat Tinggi	5

5. Kompetensi Auditor

No	Jumlah	Skala
1.	Tidak Kompeten	1
2.	Kompetensi Rendah	2
3.	Kompetensi Sedang	3
4.	Kompetensi Tinggi	4
5.	Kompetensi Sangat Tinggi	5

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi serta pemilihan risiko, dapat dilihat dalam Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dalam lampiran III keputusan ini.

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


LIMI MOKODOMPIT 

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	INSPEKTUR DAERAH	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 237 TAHUN 2024

TANGGAL : 3 Mei 2024

TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jumlah PP	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL	PJ	PM/WK PJ	DALNIS/IRBAN	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)	(17)
1	Reviu RKPD	Reviu	Kesesuaian dokumen berdasarkan regulasi	Bappeda	1	Mg-II, Mei 2024	Mg-III, Mei 2024	2	0	5	7	21	35	37.000.000,00	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
2	Reviu Renja PD	Reviu	Kesesuaian dokumen berdasarkan regulasi	OPD	1	Mg-II, Juni 2024	Mg-III, Juni 2024	2	0	5	7	21	35	14.925.000,00	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
3	Reviu rancangan KUA-PPAS	Reviu	Kesesuaian dokumen berdasarkan regulasi	OPD terkait	1	Mg-II, Juli 2024	Mg-III, Juli 2024	2	0	5	7	21	35	83.846.000,00	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
4	Reviu RKA SKPD	Reviu	Kesesuaian dokumen berdasarkan regulasi	OPD terkait	1	Mg-II, Agustus 2024	Mg-III, Agustus 2024	2	0	5	7	21	35	83.846.000,00	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
5	Reviu DAK/DAU	Reviu	Kesesuaian dokumen berdasarkan regulasi	OPD terkait	60	Mg-III Maret, Juni, September, November 2024	Mg-IV Maret, Juni, September, November 2024	120	0	45	45	90	300	137.625.000,00	15 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
6	Pemeriksaan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah	Audit/Reviu	Kesesuaian dokumen berdasarkan regulasi	OPD terkait	1	Mg I, september 2024	Mg II, september 2024	3	0	4	7	21	35	14.950.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/ Sasaran	Ruang Lingkup	Jumlah pp	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL	PJ	PM/ WK PJ	DALNIS /IRBAN	KT	AT	Jumlah						
7	Pemeriksaan akuntabilitas pengelolaan belanja daerah	Audit/Reviu	Kesesuaian dokumen berdasarkan regulasi	OPD terkait	1	Mg I, Agustus 2024	Mg II, Agustus 2024	3	0	4	7	21	35	14.950.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi		
8	Pemeriksaan pengelolaan pembiayaan daerah	Audit/Reviu	Kesesuaian dokumen berdasarkan regulasi	OPD terkait	1	Mg I, Agustus 2024	Mg II, Agustus 2024	3	0	4	7	21	35	14.950.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi		
9	Pemeriksaan pengelolaan manajemen kas dan persediaan	Audit ketataan	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	OPD	5	Mg II, Agustus 2024	Mg III, Agustus 2024	10	0	25	35	105	175	74.625.000,00	5 LHP	Laptop, ATK, Kendaraan roda 4	Tinggi		
10	Pemeriksaan pengelolaan BMD	Audit ketataan	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	OPD	1	Mg I, Juli 2024	Mg II, Juli 2024	3	0	5	7	21	36	15.425.000,00	1 LHP	Laptop, ATK, Kendaraan roda 4	Tinggi		
11	Reviu LKPD	Reviu	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	Badan Keuangan	1	Maret - April 2024	Maret - April 2024	10	0	20	20	60	110	47.500.000,00	1 LHR	Laptop, ATK, Kendaraan roda 4	Tinggi		
12	Probiy audit	Audit ketataan	Kesesuaian dokumen berdasarkan regulasi	Seluruh OPD	10	Maret - Des 2024	Maret - Des 2024	20	0	50	20	60	150	66.750.000,00	10 LHP	Laptop, ATK, Kendaraan roda 4	Tinggi		

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jumlah PP	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL	PJ	PM/WK/PJ	DALNIS/IRBAN	KT	AT	Jumlah					
13	Reviu laporan kinerja	Reviu	Kesesuaian dokumen berdasarkan regulasi	OPD	2	Mg I, Agustus 2024	Mg II, Agustus 2024	6	0	10	28	84	128	53.950.000,00	1 LHR	Laptop, ATK, Kendaraan roda 4	Tinggi	
14	Evaluasi SAKIP	Evaluasi	Kesesuaian dokumen berdasarkan regulasi	OPD	2	Mg I, Agustus 2024	Mg II, Agustus 2024	6	0	10	28	84	128	53.950.000,00	1 LHE	Laptop, ATK, Kendaraan roda 4	Tinggi	
15	Reviu LPPD	Reviu	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	OPD terkait	1	Maret 2024	Maret 2024	2	0	5	7	21	35	14.925.000,00	1 LHE	Laptop, ATK, Kendaraan roda 4	Tinggi	
16	PDPT: Perhitungan kerugian keuangan daerah	Audit Ketataan	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	Menyesuaikan	5	Maret - Des 2024	Maret - Des 2024	25	0	75	75	225	400	171.875.000,00	5 LHP	Laptop, ATK, Kendaraan roda 4	Tinggi	
17	Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan yang berbasis gender	Evaluasi	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	OPD terkait	1	Mg I April dan Oktober 2024	Mg IV April dan Oktober 2024	2	0	5	7	21	35	14.925.000,00	1 LHE	Laptop, ATK, Kendaraan roda 4	Tinggi	
18	Pemeriksaan pengelolaan keuangan desa	Reviu/Audit	Pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien	OPD terkait	15	Maret - Des 2024	Maret - Des 2024	30	0	150	150	450	780	333.750.000,00	15 LHR	Laptop, ATK, Kendaraan roda 4	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jumlah PP	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL	PJ	PM/WK PJ	DALNIS/IRBAN	KT	AT	Jumlah					
19	Pendampingan penerapan SPM	Monitoring	Memastikan kesesuaian penerapan SPM	OPD terkait	1	Mg I Oktober 2024	Mg I November 2024	2	0	5	5	15	27	11.625.000,00	1 LHM	Laptop, ATK, Kendaraan roda 4	Tinggi	
20	Audit IT / Pengawasan kualitas pengadaan barang dan jasa melalui e-Purchasing	Reviu/Audit	Menjamin kualitas pengadaan barang dan jasa telah sesuai	OPD terkait	1	Mg I, Agustus 2024	Mg II Agustus 2024	3	0	7	7	21	38	16.375.000,00	1 LHP	Laptop, ATK, Kendaraan roda 4	Tinggi	
21	Monitoring pelaporan LHKPN dan LHKASN	Monitoring	memastikan LHKPN telah laporanelah disampaikan oleh wajib lapor	OPD terkait	1	Maret 2024	Maret 2024	2	0	16	16	32	66	28.600.000,00	1 LHM	Laptop, ATK, Kendaraan roda 4	Tinggi	
22	Pelaksanaan survei penilaian integritas	Evaluasi	Memfasilitasi penilaian integritas oleh KPK	OPD terkait	1	Maret - Des 2024	Maret - Des 2024	4	0	5	5	10	24	10.625.000,00	1 LHM	Laptop, ATK, Kendaraan roda 4	Tinggi	
23	Penilaian mandiri reformasi birokrasi	Evaluasi	memudahkan Pemerintah Daerah dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi ;	OPD terkait	1	Maret - Des 2024	Maret - Des 2024	2	0	5	5	15	27	11.625.000,00	1 LHM	Laptop, ATK, Kendaraan roda 4	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jumlah PP	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL	PJ	PM/WK PJ	DALNIS/IRBAN	KT	AT	Jumlah					
24	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi	Evaluasi	menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN	OPD terkait	1	Maret - Des 2024	Maret - Des 2024	2	0	5	5	15	27	11.625.000,00	1 LHM	Laptop, ATK, Kendaraan roda 4	Tinggi	
25	Capaian aksi pencegahan korupsi yg dikoordinasikan oleh Stranas PK	Monitoring	Pemahaman terkait dengan program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi	OPD terkait	1	Maret - Des 2024	Maret - Des 2024	3	0	3	3	6	15	6.675.000,00	1 LHM	Laptop, ATK, Kendaraan roda 4	Tinggi	
26	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK (MCP-KPK)	Pemantauan	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	OPD terkait	1	Maret - Des 2024	Maret - Des 2024	6	0	4	4	16	30	13.100.000,00	1 LHM	Laptop, ATK, Kendaraan roda 4	Tinggi	
27	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli)	Evaluasi	Memastikan program sapu bersih pungli telah dilaksanakan	OPD terkait	1	Maret - Des 2024	Maret - Des 2024	12	0	12	12	48	84	36.300.000,00	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	
28	Pemeriksaan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Audit	Memastikan setiap pengaduan masyarakat bisa ditangani	OPD terkait	12	Maret - Des 2024	Maret - Des 2024	60	0	180	180	360	780	340.500.000,00	12 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jumlah PP	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL	PJ	PM/WK PJ	DALNIS/IRBAN	KT	AT	Jumlah					
29	PDTT : Investigasi/ Pengaduan Masyarakat yang berindikasi korupsi	Audit	Ketataan terhadap perundang- undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	OPD terkait	2	Maret - Des 2024	Maret - Des 2024	10	0	30	30	90	160	68.750.000,00	2 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
30	Monev TLHP BPK serta TLHP APIP	Pemantauan	Memastika n LHP telah ditindaklan juti	OPD terkait	1	Maret dan Des 2024	Maret dan Des 2024	6	0	6	6	18	36	15.750.000,00	1 LHM	Laptop, ATK	Tinggi	
31	Kapabilitas APIP Level 3	Konsultansi	Ketataan terhadap perundang- undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	OPD terkait	1	Juni 2024	Juni 2024	6	0	6	6	18	36	15.750.000,00	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	
32	Maturitas SPIP	Konsultansi	Ketataan terhadap perundang- undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	OPD terkait	1	Juni 2024	Juni 2024	6	0	6	6	18	36	15.750.000,00	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	
33	Implementasi Penerapan manajemen risiko	Konsultansi/ Evaluasi/pe mantauan	Ketataan terhadap perundang- undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	OPD terkait	1	Maret dan Des 2024	Maret dan Des 2024	10	0	30	30	90	160	68.750.000,00	2 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jumlah pp	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL	PJ	PM/WK PJ	DALNIS/IRBAN	KT	AT	Jumlah					
34	Pemenuhan Penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan Minimal 120 Jam per Tahun	Diklat dan pengembangan Kompetensi	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	BPKP,BPK,dan Lembaga lainnya	6	Maret - Des 2024	Maret - Des 2024	30	0	150	270	510	960	411.750.000,00	32 Sertifikat	Laptop, ATK	Tinggi	
35	Evaluasi Penyerapan Anggaran PBJ	Reviu	Kesesuaian dokumen berdasarkan regulasi	OPD Terkait	9	April, Juli, November 2024	April, Juli, November 2024	9	0	9	9	27	54	140.238.000,00	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	
36	Reviu P3DN	Reviu	Kesesuaian dokumen berdasarkan regulasi	OPD Terkait	3	April, Juli, November 2024	April, Juli, November 2024	9	0	9	9	27	54	140.238.000,00	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	
37	Audit Kinerja atas Pengendalian Inflasi daerah, kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, dan	Reviu	Kesesuaian dokumen berdasarkan regulasi	OPD Terkait	1	Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	3	0	7	7	21	38	16.375.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
38	Evaluasi Benturan Kepentingan dan Rotasi Mutasi Promosi ASN	Evaluasi/Reviu	Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan	BKPP	1	Des 2024	Des 2024	3	0	7	7	21	38	16.375.000,00	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	
39	Pengawasan dalam rangka Pemenuhan MCP	Reviu, Evaluasi, Audit Kepatuhan/ Kinerja	Kesesuaian dokumen berdasarkan regulasi	OPD Terkait	15	Maret - Des 2024	Maret - Des 2024	30	0	75	75	150	330	144.375.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
40	Pendampingan Pemeriksaan BPK RI	Pendampingan	Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan	OPD Terkait	2	Feb dan Maret 2024	Feb dan Maret 2024	3	0	30	30	120	183	77.250.000,00	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jumlah PP	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL	PJ	PM/WK PJ	DALNIS/IRBAN	KT	AT	Jumlah					
41	Pengawasan Dana Bos	Audit ketaatan	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	Dinas Pendidikan	5	September 2024	September 2024	15	0	75	75	225	390	166.875.000,00	5 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
42	Pengawasan Puskesmas	Audit ketaatan	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	Puskesmas	5	Agustus 2024	Agustus 2024	15	0	75	75	225	390	166.875.000,00	5 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
43	Pengawasan PDAM	Audit Keuangan dan Operasional	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	Perusahaan Daerah Air Minum	1	November 2024	November 2024	4	0	12	12	48	76	181.608.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
44	Penilaian Kinerja SKPD Terintegrasi (Akselerasi)	Evaluasi	Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan	OPD	5	Des 2024	Des 2024	15	0	50	50	200	315	133.750.000,00	5 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
45	Program Pengelolaan Pendidikan	Audit PBJ dan Reviu	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	Dinas Pendidikan	1	Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	9	17	7.375.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jumlah PP	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL	PJ	PM/WK PJ	DALNIS/IRBAN	KT	AT	Jumlah					
46	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Audit PBJ dan Reviu	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya			Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	9	17	7.375.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
47	Program Pembinaan Perpustakaan	Audit PBJ dan Reviu	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya			Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	9	17	7.375.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
48	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Audit PBJ dan Reviu	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	Dinas Pemuda dan Olahraga	1	Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	9	17	7.375.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
49	Program Perlindungan Perempuan	Evaluasi	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	9	17	7.375.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
50	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Evaluasi	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya			Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	9	17	7.375.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jumlah pp	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL	PJ	PM/WK PJ	DALNIS/IRBAN	KT	AT	Jumlah					
51	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Evaluasi	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya			Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	9	17	7.375.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
52	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Audit PBJ	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	Dinas Kesbangpol	1	Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	9	17	7.375.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
53	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Audit PBJ dan Reviu	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	Dinas kesehatan	1	Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	9	17	7.375.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Sangat Tinggi	
54	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Audit PBJ dan Reviu	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya			Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	9	17	7.375.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
55	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Audit PBJ dan Reviu	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya			Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	9	17	7.375.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jumlah pp	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL	PJ	PM/WK PJ	DALNIS /IRBAN	KT	AT	Jumlah					
56	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan	Audit PBJ dan Reviu	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya			Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	9	17	7.375.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
57	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Audit PBJ dan Reviu	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	Rumah Sakit Umum daerah	1	Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	5	5	15	27	11.625.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
58	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Reviu/Audit	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	DPPKB	1	Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	15	23	9.775.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
59	Program Pembinaan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Reviu/Audit	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya			Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	15	23	9.775.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
60	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Audit ketaatan	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	Dinas Sosial	1	Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	15	23	9.775.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jumlah PP	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL	PJ	PM/WK PJ	DALNIS /IRBAN	KT	AT	Jumlah					
61	Program peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Audit ketaatan	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	1	Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	15	23	9.775.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
62	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Audit ketaatan	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya			Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	15	23	9.775.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
63	Program Perekonomian dan Pembangunan	Reviu/Audit	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	Bagian PBJ Setda	1	Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	15	23	9.775.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
64	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Audit ketaatan	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	1	Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	15	23	9.775.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
65	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Reviu/Audit	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	Dinas Perhubungan	1	Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	15	23	9.775.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jumlah PP	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL	PJ	PM/WK PJ	DALNIS/IRBAN	KT	AT	Jumlah					
66	Program Pengelolaan dan Pengembangan Drainase	Reviu/Audit	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	15	23	9.775.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
67	Program Penyelenggaraan Jalan	Reviu/Audit	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya			Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	15	23	9.775.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
68	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Reviu/Audit	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya			Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	15	23	9.775.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
69	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Reviu/Audit	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya			Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	15	23	9.775.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
70	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Reviu/Audit	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya			Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	15	23	9.775.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jumlah pp	Jadwal		HP					Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
						RMP	RPL	PJ	PM/WK PJ	DALNIS/IRBAN	KT	AT						Jumlah
71	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Reviu/Audit	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya			Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	15	23	9.775.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
72	Program Kawasan Pemukiman	Reviu/Audit	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	1	Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	15	23	9.775.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
73	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Reviu/Audit	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya			Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	15	23	9.775.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
74	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Reviu/Audit	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya			Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	15	23	9.775.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
75	Program Penanggulangan Bencana	Reviu/Audit	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	15	23	9.775.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jumlah PP	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL	PJ	PM/WK PJ	DALNIS/IRBAN	KT	AT	Jumlah					
76	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Reviu/Audit	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	Dinas Perdagangan dan ESDM	1	Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	15	23	9.775.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
77	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Reviu/Audit	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya			Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	15	23	9.775.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
78	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Reviu/Audit	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya			Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	15	23	9.775.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
79	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Reviu/Audit	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya			Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	15	23	9.775.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
80	Program Pengembangan Ekspor	Reviu/Audit	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya			Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	15	23	9.775.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jumlah PP	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL	PJ	PM/WK PJ	DALNIS /IRBAN	KT	AT	Jumlah					
81	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Reviu/Audit	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya			Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	15	23	9.775.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
82	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Reviu/Audit	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya			Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	15	23	9.775.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
83	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Reviu/Audit	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	Dinas Koperasi dan UKM	1	Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	15	23	9.775.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
84	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Reviu/Audit	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya			Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	15	23	9.775.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
85	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Reviu/Audit	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	Dinas Perkebunan	1	Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	15	23	9.775.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jumlah PP	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL	PJ	PM/WK PJ	DALNIS/IRBAN	KT	AT	Jumlah					
86	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Reviu/Audit	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya			Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	15	23	9.775.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
87	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Reviu/Audit	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	15	23	9.775.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
88	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Reviu/Audit	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya			Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	15	23	9.775.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
89	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Reviu/Audit	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya			Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	15	23	9.775.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
90	Program Pendaftaran Penduduk	Reviu/Audit	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	Dukcapil	1	Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	15	23	9.775.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jumlah PP	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL	PJ	PM/WK PJ	DALNIS/IRBAN	KT	AT	Jumlah					
91	Program Pencatatan Sipil	Reviu/Audit	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya			Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	15	23	9.775.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
92	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Reviu/Audit	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya			Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	15	23	9.775.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
93	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Reviu/Audit	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	15	23	9.775.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
94	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Reviu/Audit	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya			Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	9	17	7.375.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
95	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Reviu/Audit	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya			Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	9	17	7.375.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jumlah PP	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL	PJ	PM/WK PJ	DALNIS/IRBAN	KT	AT	Jumlah					
96	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Audit ketaatan	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	Sekretariat Dewan	1	Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	9	17	7.375.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
97	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Audit ketaatan	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	BKD	1	Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	9	17	7.375.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
98	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Audit ketaatan	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya			Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	9	17	7.375.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
99	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Audit ketaatan	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya			Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	9	17	7.375.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jumlah PP	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL	PJ	PM/WK PJ	DALNIS/IRBAN	KT	AT	Jumlah					
100	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Audit Kinerja	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	Dinas Ketahanan pangan	1	Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	9	17	7.375.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
101	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Audit Kinerja	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya			Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	9	17	7.375.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
102	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Audit Kinerja	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya			Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	9	17	7.375.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
103	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Audit Kinerja	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya			Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	9	17	7.375.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
104	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Audit Kinerja, Reviu	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	Dinas Perikanan	1	Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	9	17	7.375.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jumlah PP	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
						RMP	RPL	PJ	PM/WK PJ	DALNIS/IRBAN	KT	AT	Jumlah					
105	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Audit Kinerja, Reviu	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya			Juli s/d Des 2024	Juli s/d Des 2024	2	0	3	3	9	17	7.375.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	

4.057.801.000,00

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	INSPEKTUR DAERAH	<i>[Signature]</i>
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 237 TAHUN 2024

TANGGAL : 3 Mei 2024

TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

REGISTER RESIKO											Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat	
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata APM (Angka Partisipasi Murni) SD dan SMP	Pelaksanaan penetapan zonasi tidak tercapai.	Dinas Pendidikan	adanya keraguan dari orang tua peserta didik terhadap kualitas sekolah/pendidikan.	Eksternal	UC	Penurunan jumlah siswa pada sekolah	Pemerintah Daerah	3	4	16	Meningkatkan sarana prasarana sekolah dan kualitas pengajar	4	4	19	1. Perubahan Judul Dampak 2. Perubahan Judul RTP Hal ini dilakukan karena ketidaksesuaian konteks
		Kwantitas tenaga pendidik ASN kurang	Dinas Pendidikan	Kurangnya perekrutan tenaga pendidik ASN	Internal	C	Kegiatan belajar mengajar tidak efektif	Siswa, Masyarakat	5	4	24	Pengusulan penambahan Tenaga Pendidik di setiap Satuan Pendidik				1. Perubahan Judul Dampak Hal ini dilakukan karena ketidaksesuaian konteks
		Kwalitas sarana dan prasarana Sekolah belum memadai	Dinas Pendidikan	Kurangnya anggaran pengadaan sarana dan prasarana sekolah	Internal	C	Proses Pembelajaran/ pelaksanaan Ujian digabung pada sekolah lain.	Siswa, Masyarakat	4	4	19	Mengevaluasi sarana dan prasaran pendidikan di sekolah pada setiap kecamatan				1. Perubahan Skala Dampak, kemungkinan, dan Nilai risiko hal ini dilakukan karena : a. dampaknya tinggi jika terjadi pada siswa dengan jarak tempuh yang jauh, b. kemungkinan berdasarkan histori yang ada 2. Perubahan RTP dilakukan karena

REGISTER RESIKO											Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat		
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)	
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena									
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran muatan lokal	kurangnya jumlah guru mata pelajaran muatan lokal	Dinas Pendidikan	tidak adanya latar belakang pendidikan tentang mata pelajaran muatan lokal	Internal	C	rendahnya mutu pendidikan pelajaran muatan lokal	Siswa dan Pemerintah Daerah	4	3	17	melaksanakan bimbingan teknis terkait budaya lokal	4	3	17	1. Perubahan Judul Risiko 2. Perubahan Judul Sebab 3. Perubahan Pihak yang terkena 4. Perubahan Skala dampak, dan nilai risiko 5. Perubahan RTP hal ini dilakukan karena ketidaksiesuaian konteks, dan skala dampak jika tidak terlaksanannya pendidikan muatan lokal, sehingga nilai risiko berubah	
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru terhadap Murid pada Satuan Pendidikan PAUD, Dasar, dan Menengah Pertama	Kurangnya Pendidik PAUD dengan kualifikasi S1 PAUD	Dinas Pendidikan	Tidak ada pengangkatan Guru PAUD dalam formasi penerimaan ASN	Internal	C	rendahnya mutu pendidikan terhadap anak usia dini	Siswa dan Pemerintah Daerah	4	5	24	Dengan menawarkan program beasiswa kepada guru yang ingin melanjutkan studi tetapi secara ekonomi tidak mampu.	4	5	23	1. Perubahan Pihak yang terkena Hal ini dikarenakan ketidaksiesuaian penetapan konteks	
		Kurangnya tenaga pendidik di Daerah Terpencil	Dinas Pendidikan	Kurangnya minat Tenaga Pendidik untuk mengajar di Sekolah yang berada di daerah terpencil	Internal	C	Rendahnya Mutu Pendidikan di daerah tersebut	Siswa dan Pemerintah Daerah	4	5	24	1. Mendistribusikan ASN secara Efektif 2. Memberikan Sanksi ASN yang tidak melaksanakan tugas 3. Memberikan Tambahan				1. Perubahan pihak yang terkena 2. Perubahan skala dampak, kemungkinan, dan nilai risiko 3. Perubahan Judul RTP hal ini dikarenakan : a. Ketidaksiesuaian Penetapan konteks b. nilai dampak jika	

REGISTER RESIKO											Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat	
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)	
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
											Penghasilan/honorarium				terjadi c. nilai kemungkinan berdasarkan histori	
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	Ijin Operasional dicabut	Dinas Pendidikan	Ijin operasional yang direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan akan tidak berlaku jika 2 semester berturut-turut tidak melakukan sinkron Dapodik.	Internal	C	Siswa tidak mendapatkan NISN	Masyarakat (Peserta didik)	4	3	17	1. Melaksanakan evaluasi kinerja pada satuan pendidikan. 2. Memberikan sanksi kepada satuan pendidikan yang lalai.	4	3	17	1. Perubahan skor dampak dan nilai risiko 2. Perubahan judul RTP hal ini dikarenakan a. dampak yang besar jika siswa tidak menerima nomor induk siswa nasional sehingga nilai risiko berubah b. Ketidaksiesuaian penetapan konteks
Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan	Meningkatkan Minat dan Budaya Baca Masyarakat	Pembinaan Perpustakaan	Ratio Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Kurangnya Minat Baca dan Jumlah Pengunjung Perpustakaan	1. Internal 2. External	C	1. Minimnya wawasan dan keilmuan 2. Kreatifitas seseorang tidak berkembang 3. Kesulitan meningkatkan kualitas diri.	1. Pemerintah Daerah 2. Masyarakat	4	4	19	1. Penyediaan bahan bacaan dan penyediaan fasilitas yang memadai. 2. Sosialisasi kepada masyarakat pentingnya membaca 3. Pengabungan minat baca dengan sekolah dan universitas	5	4	24	1. Perubahan Judul Dampak 2. Perubahan Judul RTP hal ini dikarenakan ketidaksiesuaian penetapan konteks
				Masih kurangnya tenaga pustakawan yang bersertifikasi	1. Internal 2. External	C	Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan tidak memadai	1. Pemerintah Daerah 2. Masyarakat	5	4	24	Meningkatkan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan / atau pelatihan kepustakawanan				1. Perubahan Judul Dampak 2. Perubahan Judul RTP hal ini dikarenakan ketidaksiesuaian konteks

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat (Jika terdapat perubahan nilai risiko)
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
Meningkatnya Pengelolaan Arsip	Meningkatnya sistem kearsipan yang terpadu	Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip secara Terpadu	Belum Tersedianya Pengelolaan arsip secara baku	Internal	C	Sistem Pengelolaan kearsipan tidak teratur dan tidak berada pada tempatnya	1. Pemerintah Daerah 2. Masyarakat	5	4	24	Meningkatkan Sarana dan Prasarana pengelolaan Arsip	5	4	24	1. Perubahan judul dampak 2. Perubahan judul RTP hal ini dikarenakan ketidaksesuaian penetapan konteks
				Tenaga Arsiparis yang memenuhi standar belum tersedia	Internal	C	tidak terlaksananya : 1. pengelolaan arsip dinamis dan statis; 2. pembinaan kearsipan; 3. Pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	1. Pemerintah Daerah 2. Masyarakat	5	4	24	Mengikuti penjejaran kopetensi keahlian arsiparis				1. Perubahan judul dampak 2. Perubahan judul RTP hal ini dikarenakan ketidaksesuaian penetapan konteks
Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Dikembangkan	Pemberian Bonus bagi Atlit dan Official mengalami keterlambatan	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	kendala Admistrasi yang belum terpenuhi	Internal	Control	1. Adanya Complain dari Atlit dan Official 2. menurunnya performa para Atlit dan Official untuk kembali berkompetisi akibat kelalaian panitia pelaksana	Atlit dan Official	4	4	19	menyusun data atlit dan official sesuai data valid dari pihak yang berwenang	4	4	19	

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		terjadinya salah transfer ke rekening yang tidak sesuai	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Bonus yang diberikan secara Non tunai	Internal	Control	Atlet dan pelatih memerlukan waktu untuk mengurus ke bank	Atlit dan Official	4	4	19	memberikan sosialisasi atau penyampaian kepada atlet dan official diwajibkan menggunakan rekening bank				
Meningkatnya Prestasi Olahraga	Jumlah Pemuda pelopor dan pemuda kader yang diberdayakan	Proses Penetapan Anggota Paskibraka Terlambat	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Internal	Control	dikarenakan proses persiapan yang kurang matang	1. Pemda 2. masyarakat	4	4	19	Menjalankan SOP dengan Benar				
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		terjadinya sakit yang dialami oleh peserta calon Anggota Paskibraka pada saat mengikuti seleksi	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Internal	Control	kurangnya persiapan fisik dan penajagaan stamina yang baik bagi peserta untuk mengikuti pelatihan	1. Pemda 2. masyarakat	4	4	19	memberikan arahan sebelum pelaksanaan kegiatan seleksi serta mensuplay vitamin kepada calon peserta seleksi	4	4	19	
		cuaca ekstrim saat latihan calon anggota Paskibraka dilapangan terbuka	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Internal	Control	kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi	1. Pemda 2. masyarakat	4	4	19	mengatur ulang jadwal sewaktu-waktu jika diperlukan				
		kegiatan pelatihan bagi anggota paskibraka tidak maksimal	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Internal	Control	Instruktur yang direkrut kurang berkompeten dan bukan pada ahlinya	1. Pemda 2. Masyarakat	4	4	19	1. Kriteria Instruktur harus memenuhi standar yang di tetapkan 2. instruktur yang di rekrut yang sudah berlisensi pelatih Profesional				

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
		Penggunaan dana Hibah KONI dan KNPI tidak sesuai dengan peruntukan	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Internal	Control	1.kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna peruntukan dana Hibah 2. SPJ yang di ajukan berbeda peruntukkannya dengan rincian yang tercantum dalam Proposal	Pemda dan masyarakat	4	4	19	melakukan verifikasi awal terhadap Proposal				
Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	Kurangnya calon peserta untuk mengikuti kegiatan Jambore Pramuka	Meningkatnya Prestasi Olahraga	kurangnya informasi, kurangnya sosialisasi dan penyampaian kepada para siswa dalam mengikuti kegiatan	Internal	Control	sangat minimnya siswa-siswi yang mengikuti kegiatan jambore Pramuka sehingga kegiatan berjalan tidak maksimal	Pemda dan masyarakat	4	4	19	meningkatkan sistem Informasi dan Sosialisasi kepada para peserta	4	4	19	

REGISTER RESIKO											Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat	
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		Penggunaan dana Hibah kepada KWARCAB PRAMUKA tidak sesuai dengan Peruntukan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna peruntukan dana Hibah 2. SPJ yang di ajukan berbeda peruntutkannya dengan rincian yang tercantum dalam Proposal	Internal	Control	1. terhambatnya pelaksanaan kegiatan yang sudah di jadwalkan 2. surat Pertanggungjawaban yang tidak sesuai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara	Pemda dan masyarakat	4	4	19	Kesesuaian antara Surat pertanggungjawaban dengan Proposal				
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase peningkatan kualitas keluarga	Bantuan yang diserahkan kepada kelompok usaha perempuan tidak tepat sasaran	1. Kepala Dinas 2. Kepala Bidang	Tidak dilakukannya verifikasi data penerima bantuan berdasarkan ketentuan yang berlaku.	Internal	Control	Bantuan yang diberikan tidak termanfaatkan secara optimal	Masyarakat	4	4	19	1. Melakukan Validasi Data Calon Penerima Bantuan 2. Bantuan Diserahkan berdasarkan keputusan/ketentuan yang berlaku.	4	4	19	1. Perubahan Judul Risiko 2. Perubahan Judul Sebab 3. Perubahan Judul Dampak 4. Perubahan Skor dampak dan nilai risiko 5. Perubahan Judul RTP hal ini dikarenakan : a. Ketidaksesuaian Penetapan Konteks b. Skor dampak tinggi jika bantuan tidak kena sasaran sehingga nilai risiko berubah

REGISTER RESIKO											Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat	
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan	Kurangnya Perempuan yang mendapat perlindungan	1. Kepala Dinas 2. Kepala Bidang	Kurangnya lembaga layanan perempuan yang memadai	Internal	C	Perempuan yang mengalami kekerasan tidak terlayani dengan maksimal	Masyarakat	3	4	16	1. Membuat peraturan bupati tentang pembentukan dan tupoksi lembaga perempuan tingkat desa/kecamatan. 2. Sosialisasi kepada kader desa tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan.				
		kurangnya perempuan korban kekerasan yang mendapatkan rujukan lanjutan	Kepala Dinas	1. Tidak memiliki fasilitas jaminan kesehatan 2. Kurangnya lembaga layanan perempuan yang memadai	Internal	C	Perempuan korban kekerasan tidak tertangani secara maksimal	Masyarakat	3	4	16	1. Memberikan Fasilitas kesehatan kepada korban kekerasan. 2. Mengoptimalkan Kader desa dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan.	3	4	16	
		Kurangnya penguatan dan pengembangan terhadap lembaga perlindungan perempuan	Kepala Dinas	kapasitas SDM lembaga penyedia layanan masih rendah	Internal	C	perempuan korban kekerasan tidak terlayani dan tertangani secara maksimal.	Masyarakat	3	4	16	1. merekrut personil lembaga penyedia layanan yang kompeten . 2. melakukan sosialisasi terhadap lembaga penyedia layanan.				
Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase Penyelesaian Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan	kurangnya peran perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya.	Kepala Dinas	1. Pandangan Masyarakat 2. Rendahnya rasa percaya diri dalam bersaing	Internal	C	Kesempatan perempuan dalam menyuarakan hak-hak tidak maksimal	Masyarakat	3	4	16	Melaksanakan Pelatihan peningkatan peran dan partisipasi perempuan dan melakukan sosialisasi terhadap peran serta perempuan dalam bidang politik,	3	3	14	

REGISTER RESIKO											Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat	
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
	Perempuan											hukum, sosial, ekonomi, dan budaya				
		Peran organisasi perempuan belum memadai	Kepala Dinas	kurangnya pembinaan/ monitoring terhadap organisasi perempuan	1. Internal 2. External	C	pengembangan organisasi perempuan tidak maksimal	1. Pemerintah Daerah 2. masyarakat	3	3	14	melakukan monitoring, evaluasi terhadap organisasi perempuan secara berkala dan melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi secara berkala.				
Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	Jumlah data gender dan anak	Kurangnya ketersediaan data gender dan anak yang teranalisis	Kepala Dinas	tidak tervaliasinya data gender dan anak secara berkala dan memadai	1. Internal 2. External	C	Penyajian data gender dan anak tidak akurat dan memadai	Pemerintah Daerah	3	3	14	1. Mengidentifikasi latar belakang masalah. 2. Membuat dan mengumpulkan database secara berkala. 3. Membuat aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak.	3	3	14	
Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase pemenuhan hak anak	Kurangnya pemenuhan hak anak	Kepala Dinas	lembaga pemenuhan hak anak belum memadai	1. Internal 2. External	C	Pemenuhan hak anak belum memadai	1. Pemerintah Daerah 2. masyarakat	3	4	16	1. Pembentukan Forum Anak pada 15 Kecamatan (200 Desa dan 2 Kelurahan) 2. Memberikan Pelatihan dan sosialisasi kepada anggota forum anak	3	4	16	
		Kurangnya SDM yang terlatih dalam pemenuhan Hak Anak			1. Internal 2. External	C										
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Perlindungan Khusus Anak	Penjangkauan anak yang membutuhkan perlindungan	Kepala Dinas	Kurangnya SDM dan Sarana Prasarana	1. Internal 2. External	C	Perlindungan Khusus anak belum maksimal	1. Pemerintah Daerah 2. masyarakat	3	4	16	Menambah jumlah SDM dan sarana dan prasarana penunjang pelayanan bagi anak yang	3	4	16	

REGISTER RESIKO											Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena							
		n khusus belum optimal													
				Lembaga Layanan Perlindungan Khusus anak belum memadai	Internal	C	Pelayanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus belum memadai	1. Pemerintah Daerah 2. masyarakat	3	4	16				
				SDM pengelola layanan yang terlatih manajemen kasus dan KHA belum memadai	External	C	pengelola h layanan yang terlatih manajemen kasus dan KHA belum kompeten	1. Pemerintah Daerah 2. masyarakat	3	4	16				
Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Menurunnya nilai angka partisipasi masyarakat	Kepala Badan	Kurangnya pemahaman dan kesadaran Masyarakat	Internal dan Eksternal	C	Penurunan Pendidikan wawasan Kebangsaan	Kepala Badan, Kepala Bidang dan masyarakat	3	4	16	3	4	16	
		Terjadinya pergeseran nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa	Kepala Badan	Kurangnya pendidikan idiologi pancasila dan pengaruh globalisasi	Internal dan eksternal	C	Munculnya paham yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ideologi pancasila	Kepala Badan dan Kepala Bidang serta masyarakat	3	4	16				

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)	
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
		dan bernegara														
		Berkurangnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat	Kepala Badan	Pengaruh globalisasi kepada masyarakat	Internal dan eksternal	C	Kesenjangan sosial, budaya dan ekonomi	Kepala Badan dan Kepala Bidang serta masyarakat	3	4	16	Melakukan penguatan budaya yang berkearifan lokal				
Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase pelaksanaan program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Kurangnya pendidikan politik	Kepala Badan	Belum optimalnya partisipasi Masyarakat	Eksternal	C	Penurunan budaya demokrasi yang berlandaskan etika dan moral serta stabilitas ideologi Politik dan Sosial budaya	Kepala Badan Kesbangpol dan Kepala Bidang	3	4	16	Penambahan anggaran peningkatan SDM untuk pendidikan politik	3	4	17	
		Tingginya budaya apatis terhadap pendidikan politik serta kurangnya etika dalam politik	Kepala Badan	Kurangnya pendidikan politik kepada masyarakat	Internal dan eksternal	C	rendahnya partisipasi masyarakat atas pendidikan politik	Kepala Badan dan Kepala Bidang serta masyarakat	3	4	16	Koordinasi dan komunikasi dengan partai-partai politik				
												Mengadakan/melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat				

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
		Menurunnya budaya demokrasi yang bermartabat	Kepala Badan	Stigma masyarakat yang negatif atas budaya politik di era globalisasi	Internal dan eksternal	C	Berkurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam agenda-agenda politik	Kepala Badan, Kepala Bidang dan masyarakat	4	3	17	Melaksanakan sosialisasi bersama lembaga pendidikan				
		Kurang tertib administrasi, keanggotaan dan SDM yang kurang memadai	Kepala Badan	Kurangnya pertemuan rutin dengan organisasi kemasyarakatan dan monitoring terhadap keberadaan ormas secara berkala	Internal dan eksternal	C	Aktivitas ormas belum sepenuhnya menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan AD/ART	Kepala Badan dan Kepala Bidang serta ormas	4	3	17	Melaksanakan monitoring secara berkala atas keberadaan ormas	4	3	17	
												Melaksanakan sosialisasi untuk peningkatan SDM				
												Membentuk tim pengawas ormas				
												Membuat SOP untuk pedoman				
Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase pelaksanaan program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas	Terjadinya pertikaian dilingkungan masyarakat	Kepala Badan	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam aspek keamanan	Internal dan Eksternal	C	Terganggunya stabilitas keamanan dimasyarakat	Kepala badan dan lintas sektoral serta masyarakat	4	3	17	Bekerjasama dengan lintas sektor dalam penanganan keamanan	4	3	17	

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
	dan fasilitasi penanganan konflik sosial															
												Melakukan monev secara berkala untuk meminimalisir terjadinya konflik horisontal				
												Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga stabilitas keamanan				
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase FKTP Yang Tersertifikasi Akreditasi	Tidak dapat melaksanakan kerja sama dengan BPJS / Syarat Recredensia ling (Perpanjangan Kerjasama)	Kepala OPD	Puskesmas tidak terakreditasi	Internal	C	Puskesmas tidak dapat melakukan pelayanan, berkurangnya Kapitasi sehingga berdampak kepada motivasi dan kesejahteraan petugas	Kepala OPD, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	5	2	21	Melaksanakan tahapan akreditasi : Tahap pengusulan, tahap penilaian dan tahap pendampingan pasca survey	4	3	17	

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat (Jika terdapat perubahan nilai risiko)
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit		
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
		Meningkatnya Komplain Masyarakat terkait pelayanan yang kurang berkualitas sehingga mengurangi tingkat kepercayaan	Kepala OPD	Jaminan mutu rendah	Internal	C	Tingkat kepuasan rendah, target kunjungan puskesmas rendah	Kepala OPD, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	4	2	13	Meningkatkan Kapasitas petugas sesuai standar				
		Rencana Pengadaan barang/jasa bukan berdasarkan kebutuhan/ulasan pihak pengguna	Kepala OPD	Kelalaian PA dan Tim/personil Penyusun Rencana Kegiatan	Internal	C	Barang/jasa yang diadakan tidak termanfaatkan secara optimal	Kepala OPD	3	3	14	Peningkatan Kompetensi petugas perencana				
		Spesifikasi barang/jasa tidak sesuai kebutuhan	Kepala OPD	Kelalaian PPK dan Tim Kerja PPK	Internal	C	Barang/jasa yang diadakan tidak termanfaatkan secara optimal	Kepala OPD, PPK	3	3	14	Peningkatan Kompetensi petugas perencana				
		Terdapat BMD hasil pengadaan yang belum diserahkan akan oleh PPK kepada PA	Kepala OPD	Kelalaian PPK	Internal	C	Nilai aset dalam pembukuan menjadi tidak akurat dan berpotensi menjadi temuan BPK	Kepala OPD, PPK	3	3	14	Peningkatan Kompetensi petugas perencana				

REGISTER RESIKO											Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat	
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)	
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Semesta	Persentase Sumber Daya Kesehatan Yang Mengikuti Pelatihan	Potensi penyimpangan terhadap transformasi SDM Kesehatan	Kepala OPD	Kurangnya ketrampilan SDM,	Internal	C	Terganggu kelancaran pelaksanaan tugas, turunnya citra, kepercayaan dan nama baik unit kerja	Kepala OPD, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	4	2	13	Peningkatan Kompetensi petugas perencana	4	2	13	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan																
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Semesta	Persentase Puskesmas dan Apotik yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar	Kesalahan Pemberian Obat Pada Pasien	Kepala OPD	Identifikasi pasien yang tidak lengkap, penulisan resep kurang jelas	Internal	C	Pasien mendapat obat yang tidak tepat, terjadi alergi yang dapat mengakibatkan kematian	Kepala OPD, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	5	2	21	Pengawasan Berjenjang				
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman		Salah Cara Penggunaan Obat	Kepala OPD	Penyuluhan informasi obat kurang jelas	Internal	C	Efektifitas obat berkurang, terjadi resiko efek samping	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	5	2	21	Pengawasan Berjenjang	5	2	21	
		Salah Cara Pemberian Dosis Obat	Kepala OPD	Penulisan Resep Yang Kurang Jelas	Internal	C	Terjadi over dosis obat, efek obat yang tidak optimal	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	5	2	21	Pengawasan Berjenjang				

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Semesta		Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berPHBS	Kepala OPD	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya berPHBS	Eksternal	UC	Rendahnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya penyakit menular berbasis lingkungan dan penyakit tidak menular	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	3	3	14	Pengawasan Berjenjang				
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Produk kebijakan kesehatan daerah masih lemah secara hukum sehingga tidak dianggap penting dan sulit diterapkan	Kepala OPD	Kebijakan hanya berbentuk himbauan dan belum terdapat sanksi mengikat, Kebijakan yang tidak populer tidak terlaksana sehingga kebijakan tentang kesehatan rendah	Internal	C	Rendahnya derajat kesehatan masyarakat, Indikator Keluarga Sehat tidak tercapai	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	3	3	14	Ada pertemuan terjadwal	3	3	14	
Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Standar Akreditasi Rumah Sakit Yang terpenuhi	rumah sakit tidak bisa melakukan pelayanan kepada pasien BPJS	Direktur RSUD	Mempercepat proses pelaksanaan akreditasi	Internal	C	Mutu pelayanan rumah sakit tidak sesuai standar	pemda bolmong/ masyarakat	5	1	20	Mempercepat proses pelaksanaan akreditasi	5	2	21	

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
		Kondisi keuangan rumah sakit menurun	Direktur RSUD	memperketat pengawasan terhadap pasien dan pembesuk di rumah sakit.	internal	C	PAD Rumah Sakit menurun/aporan keuangan RSUD tidak akuntabel	manajemen rumah sakit	4	3	17					memperketat pengawasan terhadap pasien dan pembesuk di rumah sakit.
		terbatasnya penyediaan obat-obatan dan sarana kesehatan lainnya	Direktur RSUD	Mengidentifikasi jenis obat-obatan yang di laksanakan melalui proses e-katalog dan pengadaan langsung.	internal	C	terjadinya kekosongan stok obat di apotik	pasien rumah sakit	5	3	22					Mengidentifikasi jenis obat-obatan yang di laksanakan melalui proses e-katalog dan pengadaan langsung.
Meningkatnya mutu pelayanan sesuai standar kesehatan																
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan	pelayanan kesehatan kurag maksimal	Direktur RSUD	Terbatasnya sumber daya yang profesional dibidang pelayanan	internal	C	ketidakpuasan terhadap pelayanan rumah sakit	pasien rumah sakit petugas kesehatan	3	3	14		3	3	14	Melaksanakan/mengikuti Bimtek/diklat terkait dengan pelayanan yang profesional sesuai standar kesehatan
Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan semesta																
Program Pengendalian Penduduk	Cakupan data Keluarga Berencana (KB)	Kapabilitas Kader KB kurang	Kepala Dinas PPKB	Kurangnya pendampingan tenaga Penyuluh KB kepada Kader	Internal	C	Data KB Tidak terupdate secara keseluruhan	Kepala Dinas PPKB	4	4	19		4	4	19	Melakukan kunjungan kembali pada keluarga sasaran
																Menambah Tenaga Penyuluh KB

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
												Memaksimalkan Balai Penyuluh KB dan Rumah Data kependudukan				
												Melakukan Pembinaan Lini Lapangan				
		Terjadinya kesalahan dalam inputing data	Kepala Dinas PPKB	Ketidaktelitian Petugas Pendata	Internal	C	Data Kurang Akurat	Kepala Dinas PPKB	4	3	17	Melakukan Pemeliharaan jaringan Internet				
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Kelahiran yang tidak terencana	Kepala Dinas PPKB	PUS yang tidak ber-KB	Internal/ Eksternal	C	Penduduk tidak terkendali	Kepala Dinas PPKB	5	3	22	Melakukan Pelayanan KB MKJP				
												Konseling Khusus (Kunjungan Rumah)	5	4	24	
		Drop Out Akseptor KB	Kepala Dinas PPKB	rendahnya penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Internal/ Eksternal	C	Kehamilan yang tidak terencana	Kepala Dinas PPKB	4	4	19	PUS yang menggunakan KB PIL atau Suntik dan atau Tradisional dianjurkan untuk menggunakan MKJP				
Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS	Pembinaan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Keluarga Berisiko Stunting	Kepala Dinas PPKB	Adanya perceraian, Faktor Ekonomi Keluarga, Budaya dalam Keluarga, Pola asuh Anak, Pernikahan Dini	Internal/ Eksternal	UC	Anak Lahir Stunting	Kepala Dinas PPKB	5	4	24	Membentuk Tim Pandamping Keluarga (TPK) di setiap Desa	5	4	24	

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan bagi PMKS	Bantuan tidak tepat sasaran	Kepala OPD	Belum validnya data DTKS	Internal/ Eksternal	C	Minimnya Penurunan Angka Kemiskinan dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar	Masyarakat	5	2	21	Melaksanakan Pelatihan Aplikasi Siks-NG				
		Jenis bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan individu/keompok penerima bantuan sosial	Kepala OPD	Kelalaian tim/petugas perencanaan Bansos	Internal	C	Bantuan tidak bermanfaat dan terjadinya pemborosan keuangan daerah	Masyarakat	4	4	19	Melakukan survey kebutuhan	4	4	19	
				Tidak dilaksakan survey kebutuhan			Bantuan tidak tepat sesuai kebutuhan									
		Kesalahan dalam menetapkan spesifikasi barang Bansos	Kepala OPD	Kelalaian PA/KPA	Internal	C	Bansos yang diberikan tidak dimanfaatkan secara optimal	Masyarakat	3	4	16	Pemantauan pada saat penyusunan perencanaan pengadaan bansos				
				Kurangnya personil yang memahami tentang proses PBJ			Bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak bermanfaat									

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
		Penerima Bansos tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan	Kepala OPD	Kelalaian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang tidak menetapkan klasifikasi kriteria penerima bansos secara jelas	Internal	C	Bansos tidak tepat sasaran dan terjadinya kerugian/pemborosan keuangan daerah	Masyarakat	4	4	16	Pemberian Pelatihan dan Pembentukan Operator Siks-NG disetiap Desa dan sosialisasi mengenai kriteria penerima bansos				
				Kelalaian petugas pendataan diwilayah			Penerima bantuan sosial tidak tepat sasaran									
				Tidak adanya sosialisasi tentang persyaratan penerima bansos												
		Masih banyaknya angka penyandang masalah kesejahteraan yang belum terakses dan diberdayakan dan belum mendapatkan pelayanan	Kepala OPD	Terbatasnya SDM dan sarana prasarana serta operasional pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan Sosial	Internal	C	Tidak akan berkurangnya angka penyandang masalah kesejahteraan	Masyarakat	4	4	19	Penambahan sarana prasarana serta operasional pelayanan				
							Memaksimalkan jumlah SDM dari tenaga sosial baik profesional maupun relawan									

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat (Jika terdapat perubahan nilai risiko)
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan Jaminan Sosial	Bantuan sosial yang diberikan belum tepat sasaran	Kepala OPD	Masih banyak data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang belum terverifikasi	Internal/ Eksternal	C	Bantuan sosial yang diberikan belum tepat sasaran	Masyarakat	5	2	21	Melaksanakan Pelatihan Aplikasi Siks-NG	4	4	19	
												Pemberian Pelatihan dan Pembentukan Operator Siks-NG disetiap Desa				
		Jenis bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan individu/kelompok penerima bantuan sosial	Kepala OPD	Kelalaian tim/petugas perencanaan Bansos	Internal	C	Bantuan tidak bermanfaat dan terjadinya pemborosan keuangan daerah	Masyarakat	4	4	19	Melakukan survey kebutuhan				
		Kesalahan dalam menetapkan spesifikasi barang Bansos	Kepala OPD	Kelalaian PA/KPA	Internal	C	Bansos yang diberikan tidak termanfaatkan secara optimal	Masyarakat	3	4	16	Pemantauan pada saat penyusunan perencanaan pengadaan bansos				
		Penerima Bansos tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan	Kepala OPD	Kelalaian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Internal	C	Bansos tidak tepat sasaran dan terjadinya kerugian/pemborosan keuangan daerah	Masyarakat	3	4	16	Pemberian Pelatihan dan Pembentukan Operator Siks-NG disetiap Desa dan sosialisasi mengenai kriteria penerima bansos				

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat (Jika terdapat perubahan nilai risiko)
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
		Tidak sinkronnya pendataan dan validasi data	Kepala OPD	Kurangnya SDM yang ada untuk membantu penanganan fakir miskin	Internal	C	Tidak validnya data dan relawan yang ada untuk membantu penanganan fakir miskin	Masyarakat	4	4	19	Mengadakan kegiatan yang menyentuh masyarakat lapisan bawah				
		Data yang dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen kegiatan kurang lengkap dan valid karena update data tidak dilakukan secara berkala	Kepala OPD	Update data dari tingkat desa yang tidak aktif secara berkala	Internal	C	Bansos salah sasaran	Masyarakat	4	4	19	Koordinasi dalam bentuk desk data dan Intensifikasi kegiatan verifikasi dan validasi data				
		HPS tidak didukung oleh dokumentasi penyusunan HPS yang memadai	Kepala OPD	Kelalaian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Internal	C	Bansos tidak tepat sasaran dan terjadinya kerugian/pemborosan keuangan daerah	Masyarakat	3	3	14	Pemantauan pada saat penyusunan anggaran dan mengacu pada SBU				
		HPS disusun terlalu rendah	Kepala OPD	Kelalaian PPK dan tim kerja PPK	Internal	C	Kegiatan tidak/terlambat terlaksana	Masyarakat	3	3	14	Pemantauan pada saat penyusunan anggaran dan mengacu pada SBU				
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Minimnya bantuan Logistik dan Shelter	Kepala OPD	Kurangnya Anggaran dalam Penanganan Bencana	Internal	C	tidak terlayannya korban bencana secara	Masyarakat	2	4	12	Akan melakukan perubahan anggaran / Pergeseran	3	3	14	

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
	yang Tertangani						keseluruhan									
		Terjadi keterlambatan penyerahan bansos	Kepala OPD	Kelalaian PPK atau tim penyalur	Internal	C	Penerima bansos terlambat memanfaatkan bantuan	Masyarakat	4	4	19	Penambahan sarana prasarana serta operasional pelayanan dan Memaksimalkan jumlah SDM dari tenaga sosial baik profesional maupun relawan				
	Pendistribusian bantuan terhalang oleh faktor alam			Bantuan yang diserahkan tidak tepat waktu												
	Keterlambatan proses PBJ															
		Penyimpangan penggunaan bansos oleh pihak penerima	Penerima bansos	Kelalaian penerima dana bansos	eksternal	C	Bantuan tidak bermanfaat dan terjadinya pemborosan keuangan daerah	Masyarakat	3	3	14	Proposal didukung dengan surat keterangan dari pemerintah desa mengenai keahlian profesi				
	Ketidakmampuan penerima dalam mengelola bansos			Tujuan kegiatan tidak tercapai												
		Pada saat dilapangan rentan terhadap bencana	Penerima bansos	Sarana dan prasarana kurang memadai	Internal	C	Terlambatnya penyaluran bansos	Masyarakat	3	3	14	Penyaluran logistik oleh pihak yang telah ditentukan				
	Penambahan/rekrutmen relawan															

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
		Pengajuan proposal bantuan permintaan bantuan terlambat	Penerima bansos	Terlambat dalam pengajuan permintaan bantuan	Internal/eksternal	C	Terjadinya kekosongan stok digudang	Masyarakat	3	3	14	Memberikan warning kepada pihak terkait untuk tepat waktu menyampaikan laporan stok				
												Membuat pemberitahuan stok yang tersedia digudang				
ROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah PSKS (Potensi Sumber Keajahteraan Sosial yang Aktif	Belum tersedianya Sarana dan Prasarana untuk penyaluran Logistik	Kepala OPD	Kurangnya Anggaran dalam Penanganan Bencana	Internal	C	Terlambatnya Penyaluran bantuan bagi korban bencana	Masyarakat	4	4	19	Mengusulkan Pengadaan Kendaraan Operasional Bencana				
		Jenis bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan individu/kelompok penerima bantuan sosial	Kepala OPD	Kelalaian tim/petugas perencanaan Bansos	Internal	C	tidak terlayannya korban bencana secara keseluruhan	Masyarakat	4	4	19	Melakukan survey kebutuhan				
		Kesalahan dalam menetapkan spesifikasi barang Bansos	Kepala OPD	Kelalaian PA/KPA	Internal	C	Bansos yang diberikan tidak termanfaatkan secara optimal	Masyarakat	3	4	16	Pemantauan pada saat penyusunan perencanaan pengadaan bansos	4	4	19	
		Penerima Bansos tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan	Kepala OPD	Kelalaian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Internal	C	Bansos tidak tepat sasaran dan terjadinya kerugian/pemborosan keuangan daerah	Masyarakat	3	4	16	Pemberian Pelatihan dan Pembentukan Operator Siks-NG disetiap Desa dan sosialisasi mengenai kriteria penerima bansos				

REGISTER RESIKO											Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat (Jika terdapat perubahan nilai risiko)	
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
		Masih banyaknya PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang belum mempunyai SDM yang memadai					Kurangnya pengetahuan pendamping PSKS, maka tidak semua masyarakat terlayani.	Masyarakat	4	4	19	Melakukan pelatihan bagi PSKS yang belum mendapatkan Pelatihan				
		Masih banyak yang belum mendapatkan pelatihan mengenai kesiapsiagaan bencana					Terhambatnya proses penanganan bencana	Masyarakat	3	3	14	melaksanakan penyuluhan/sosialisasi terhadap kesiapsiagaan bencana				
												melaksanakan penyuluhan/sosialisasi terhadap kesiapsiagaan bencana				
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengembangan Kebudayaan dan pelaku seni budaya	Belum adanya fasilitas Dekorasi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kurangnya Event dan Anggaran	Internal	C	Promosi pariwisata tidak maksimal	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Masyarakat	4	2	12	Melengkapi ketersediaan bahan dekorasi	4	2	13	Penetapan skor nilai risiko tidak sesuai dengan Perbup Manajemen risiko nomor 46 tahun 2021
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan kesenian yang dikembangkan	Kurangnya pengetahuan tentang adat istiadat Kabupaten Bolaang Mongondow	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Belum terlaksananya pelatihan adat istiadat	Internal	C	Punahnya adat istiadat yang ada di kabupaten Bolaang Mongondow	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Masyarakat	4	2	12	Melaksanakan pelatihan secara bertahap kepada seluruh pelaku adat dan perangkat adat di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow	4	2	13	

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat (Jika terdapat perubahan nilai risiko)
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya yang terdata	Belum ditetapkan ya Cagar Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Belum adanya TACB (Tim Ahli Cagar Budaya)	Internal	C	Belum adanya penetapan cagar budaya di Kabupaten Mongondow	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Masyarakat	5	3	18	Mengusulkan daftar Cagar Budaya untuk mendapat penetapan Tim TACB (Tim Akreditasi Cagar Budaya)	5	3	22	
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Prosetase wisata permuseuman yang dilestarikan	Belum ada Museum	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Belum ada tempat penyimpanan koleksi barang bersejarah	Internal	C	Barang-barang bersejarah tidak dapat dilestarikan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Masyarakat	5	3	18	Membentuk tim, membuat proposal pengajuan permintaan pembangunan museum	5	3	22	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	1. Data tidak dilakukan Update 2. Potensi objek pajak tidak memiliki izin usaha 3. Masih rendahnya promosi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1. Tidak ada SOP pedoman pelaksanaan yang jelas tentang pengelolaan data 2. Potensi objek pajak tidak memiliki izin usaha 3. Kurangnya Anggaran dan Personil	Internal/ Eksternal	C	1. Penyajian data tidak valid 2. Potensi objek pajak tidak memiliki izin usaha 3. PAD dan Kunjungan wisata kurang maksimal	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Masyarakat	3	2	11	Melaksanakan Festival, pemilihan Nanu Uyo, melakukan kerja sama dengan pihak bandara untuk Promosi Pariwisata	3	2	11	

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	persentase pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Belum ada Data UMKM	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Belum dilaksanakannya pembentukan kelompok UMKM	Eksternal	C	Ekonomi kreatif tidak berkembang	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Masyarakat	4	2	13	Melakukan pendataan dan Pelatihan untuk menunjang Ekonomi Kreatif	4	2	13	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Prosentase peningkatan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Kurangnya peminat kegiatan pelatihan/peningkatan kompetensi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Tidak tepatnya kegiatan sosialisasi kepada kelompok sasaran	Internal/ Eksternal	C	Tidak terlaksananya kegiatan pelatihan yang tidak tetap sasaran	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Masyarakat	4	2	13	Memberikan pelatihan tentang Kepariwisataaan	4	2	13	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase peningkatan kunjungan wisatawan	Jenis kegiatan pelatihan/peningkatan kompetensi, tidak sesuai dengan kebutuhan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kelalaian tim/personil perencana kegiatan	Internal/ Eksternal	C	Kelompok sasaran penerima kegiatan tidak mendapatkan nilai tambah (pemahaman dan Keterampilan)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Masyarakat	4	2	13	Melaksanakan promosi destinasi wisata	4	2	13	

REGISTER RESIKO											Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat	
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Jumlah kegiatan pelatihan kerja	Jenis kegiatan pelatihan/peingkatan kompetensi tidak/kurang sesuai dengan kebutuhan	Kepala OPD	Kelalaian Tim/Personil Perencana Kegiatan	Internal	C	Kelompok sasaran penerima kegiatan tidak mendapatkan nilai tambah (pemahaman dan keterampilan) sesuai yang dibutuhkan	Masyarakat	2	2	7	Melakukan analisis kebutuhan kegiatan pelatihan/peningkatan kompetensi				
		Sedikitnya peminat kegiatan pelatihan/peingkatan kompetensi	Kepala OPD	Tidak tepatnya kegiatan sosialisasi kepada kelompok sasaran	Internal	C	Kegiatan pelatihan tidak terlaksananya	Masyarakat	3	4	17	Melakukan analisis kebutuhan kegiatan pelatihan/peningkatan kompetensi terutama kelompok sasaran yang membutuhkan	2	3	10	
		Peserta yang sudah mendaftar tidak hadir	Kepala OPD	Kelalaian calon peserta	Eksternal	C	Terjadinya pemborosan keuangan negara/d daerah	Masyarakat	2	2	7	Melakukan komunikasi konfirmasi kehadiran				
Program perencanaan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang direncanakan	Masih kurangnya pendidikan vokasi atau BLK di Kabupaten	Kepala OPD	Kurangnya alokasi anggaran	Eksternal	C	Kurangnya kompetensi tenaga kerja	Masyarakat	3	4	17	Menyusun database ketenagakerjaan dan memetakan prioritas advokasi	3	4	16	
Tersedianya penempatan tenaga kerja																

REGISTER RESIKO											Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat	
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
Program penempatan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Masih kurangnya Pekerja migran di Kabupaten Bolaang Mongondow	Kepala OPD	Kurangnya Sosialisasi Peluang Kerja ke luar Negeri	Eksternal	C	Kurangnya Tenaga Kerja yang memiliki Kompetensi	Masyarakat	4	2	13	Menyusun database ketenagakerjaan dan memetakan prioritas pekerja migran	3	2	11	
		Masih Kurangnya Lowongan kerja Di Kabupaten Bolaang Mongondow	Kepala OPD	Kurangnya Peluang kerja di Pemerintahan dan Perusahaan - Perusahaan	Eksternal	C	Masih tingginya Angka pengangguran	Masyarakat	2	2	7	Menyusun database ketenagakerjaan				
Program hubungan industrial	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan	Masih kurangnya Perusahaan yang menerapkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Kepala OPD	Masih Banyaknya Perusahaan kecil yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow	Eksternal	C	Pekerja rentan di PHK	Masyarakat	4	2	13		4	2	13	
Program perencanaan kawasan transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi	Belum Adanya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Untuk Kawasan Transmigrasi	Kepala OPD	Belum adanya Pelepasan Kawasan Hutan oleh Instansi terkait untuk Lahan Transmigrasi	Eksternal	C	Tidak Adanya Kawasan Transmigrasi Di Kabupaten Bolaang Mongondow	Masyarakat	4	2	13		4	2	13	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas	Terlaksananya Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terjadinya penolakan atau bentrok dengan warga atau yang menjadi target/sasaran penindakan	Kepala OPD	Warga tidak menerima tindakan yang dilakukan oleh petugas	External	UC	Penindakan atas penegakan Perda tidak terlaksana atau terhambat	OPD Secara Khusus, dan Pemda secara keseluruhan	4	4	19	1. Melakukan tindakan persuasif kepada masyarakat 2. Memberikan penyuluhan/sosialisasi tentang Perda yang dilanggar	4	4	19	

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
		Sarana/kendaraan operasional rusak/ tidak dapat beroperasi	Kepala OPD	1. Kurangnya pemeliharaan, antara lain belanja suku cadang dan kebutuhan BBM 2. Hal-hal Yang diluar prediksi.	Internal	C	penindakan atas pelanggaran Perda tidak terlaksana atau terhambat	OPD	4	3	17	1. Melaksanakan pemeliharaan rutin yang lebih intensif dengan cara penambahan anggaran 2. Mengajukan penambahan pagu anggaran untuk pemeliharaan rutin kendaraan damkar, mengingat unit damkar membutuhkan biaya pemeliharaan yang cukup tinggi				
Meningkatnya kualitas pelayanan dan pencegahan bahaya kebakaran/ Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Non Kebakaran	Pelayanan terhadap korban Kebakaran yang tidak terlayani secara cepat	Kepala OPD	Jumlah unit damkar dan sopir damkar yang tidak memadai sehingga tidak dapat mencapai daerah yang jauh tepat waktu	Internal	UC	masyarakat tidak puas dengan pelayanan penanggulangan dan penyelamatan kebakaran	Masyarakat	5	5	25	Mengajukan Penambahan Pagu Anggaran untuk pengadaan unit Damkar dan tenaga sopir Damkar	5	4	24	
									5	4	24					

REGISTER RESIKO											Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat	
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik							Pelaksanaan tugas dilapangan menjadi terhambat, tidak tepat waktu, tidak efektif dan efisien	OPD	4	3	17	Mengajukan penambahan padu anggaran untuk pengadaan perlengkapan APD bagi petugas damkar				
Program Perekonomian dan Pembangunan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang Terhambat	SEKDA	Gangguan Jaringan	Internal/ Eksternal	UC	Proses PBJ tidak tepat waktu, Pekerjaan tidak selesai dan serapan anggaran tidak sesuai target	SKPD/Pelaku Usaha	3	4	16	Penambahan bandwidth				
				Gangguan Aplikasi	Internal/ Eksternal	UC						Meningkatkan koordinasi dengan LKPP	3	4	16	
				Keterlambatan data dari SKPD dalam menyampaikan usulan tender ke UKPBJ	Internal/ Eksternal	C						Meningkatkan Koordinasi dan melaksanakan Desk dengan Perangkat Daerah terkait				
				Dokumen tender yang disampaikan oleh SKPD tidak lengkap	Internal/ Eksternal	C										

REGISTER RESIKO											Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat	
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Kinerja Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Tidak Tercapainya Target Nilai LPPD dan SPM	SEKDA	Kurangnya Kesadaran OPD Dalam Meningkatkan Kinerja	Internal	UC	Capaian nilai LPPD dan SPM tidak memenuhi target	Kepala OPD	5	5	25	Memberikan penjelasan secara intens terkait penyusunan LPPD dan SPM	5	5	25	
Terwujudnya Penyelenggaraan Lalulintas Dan Angkutan Jalan Yang Aman, Nyaman Dan Lancar	Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan (Persen)	Kurangnya Data Kelengkapan Sarana Prasarana Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan	Kurangnya Tenaga Survey Data	Internal	C	Tidak adanya data yang dapat digunakan untuk perencanaan pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Dinas Perhubungan dan pihak penyedia	4	3	17	Menambah tenaga pendataan				
Penyelenggaraan Lalulintas Dan Angkutan Jalan												Meningkatkan kapabilitas SDM terkait survey Sarana Prasarana Perhubungan	4	3	17	
												Membuat Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten				
												Pendampingan Tenaga Ahli dalam pembuatan rencana induk LLAJ Kabupaten				
		Kurangnya Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang	Kepala Dinas Perhubungan	Tidak tersedia Sarana dan Prasarana Perhubungan yang dibutuhkan	Internal	C	Tidak maksimal Penyelenggaraan Lalulintas Dan Angkutan Jalan Yang	Masyarakat	4	3	17	Menambah Sarana Prasarana Perhubungan sampai memenuhi Target				

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
							Aman, Nyaman Dan Lancar									
Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi	Jumlah Bangunan Sumber Daya Air yang di Kelola	Kegagalan Proses Tender	Kepala OPD dan PPK	Tidak ada penyedia jasa yang memenuhi syarat	Eksternal	U	Pekerjaan tidak terlaksana tepat waktu	Masyarakat penerima manfaat	5	2	21	Mempercepat jadwal pelaksanaan tender				
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Umur konstruksi bangunan tidak tercapai	Kepala OPD dan PPK	Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak	Internal	C	Hasil produksi pertanian menurun	Masyarakat	4	3	17	Meningkatkan pengawasan dilapangan dan melakukan evaluasi melalui SCM	5	2	21	
		Keterlambatan penyelesaian pekerjaan	Kepala OPD dan PPK	Kelalaian Pihak Penyedia	Eksternal	U	Pekerjaan terlambat diterima dan dimanfaatkan	Kepala OPD, PPK, PPTK	5	1	20	Melakukan addendum waktu pelaksanaan kontrak				
		Terjadinya forcemajor	Kepala OPD dan PPK	Bencana alam/sosial	Internal/ Eksternal	UC	Pekerjaan tidak dapat dilaksanakan	Masyarakat	5	1	20	Melakukan addendum lokasi pekerjaan				
Meningkatnya Layanan air minum	Persentase Jaringan Instalasi Air Minum Terpasang dalam kondisi Baik	Kegagalan Proses Tender	Kepala OPD dan PPK	Tidak ada penyedia jasa yang memenuhi syarat	Eksternal	U	Pekerjaan tidak terlaksana tepat waktu	Masyarakat penerima manfaat	5	2	21	Mempercepat jadwal pelaksanaan tender	5	2	21	

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Umur konstruksi bangunan tidak tercapai	Kepala OPD dan PPK	Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak	Internal	C	Hasil produksi pertanian menurun	Masyarakat	4	3	17	Meningkatkan pengawasan dilapangan dan melakukan evaluasi melalui SCM				
		Keterlambatan penyelesaian pekerjaan	Kepala OPD dan PPK	Kelalaian Pihak Penyedia	Eksternal	U	Pekerjaan terlambat diterima dan dimanfaatkan	Kepala OPD, PPK, PPTK	5	1	20	Melakukan addendum waktu pelaksanaan kontrak				
		Terjadinya forcemajor	Kepala OPD dan PPK	Bencana alam/sosial	Internal/ Eksternal	UC	Pekerjaan tidak dapat dilaksanakan	Masyarakat	5	1	20	Melakukan addendum lokasi pekerjaan				
Meningkatnya kualitas layanan Sanitasi	Persentase layanan penyediaan sistem air limbah	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan	Kepala OPD dan PPK	Kelalaian Pihak Penyedia	Eksternal	U	Pekerjaan terlambat diterima dan dimanfaatkan	Kepala OPD, PPK, PPTK	5	1	20	Melakukan addendum waktu pelaksanaan kontrak	5	2	21	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Umur konstruksi bangunan tidak tercapai	Kepala OPD dan PPK	Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak	Internal	C	Hasil produksi pertanian menurun	Masyarakat	4	3	17	Meningkatkan pengawasan dilapangan dan melakukan evaluasi melalui SCM	5	2	21	

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena									
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase layanan Jaringan Drainase Kabupaten	Terjadinya forcemajor	Kepala OPD dan PPK	Bencana alam/sosial	Internal/ Eksternal	UC	Pekerjaan tidak dapat dilaksanakan	Masyarakat	5	1	20	Melakukan addendum lokasi pekerjaan				
		Kegagalan Proses Tender	Kepala OPD dan PPK	Tidak ada penyedia jasa yang memenuhi syarat	Eksternal	U	Pekerjaan tidak terlaksana tepat waktu	Masyarakat penerima manfaat	5	2	21	Mempercepat jadwal pelaksanaan tender				
		Umur konstruksi bangunan tidak tercapai	Kepala OPD dan PPK	Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak	Internal	C	Hasil produksi pertanian menurun	Masyarakat	4	3	17	Meningkatkan pengawasan dilapangan dan melakukan evaluasi melalui SCM				
		Keterlambatan penyelesaian pekerjaan	Kepala OPD dan PPK	Kelalaian Pihak Penyedia	Eksternal	U	Pekerjaan terlambat diterima dan dimanfaatkan	Kepala OPD, PPK, PPTK	5	1	20	Melakukan addendum waktu pelaksanaan kontrak				
		Terjadinya forcemajor	Kepala OPD dan PPK	Bencana alam/sosial	Internal/ Eksternal	UC	Pekerjaan tidak dapat dilaksanakan	Masyarakat	5	1	20	Melakukan addendum lokasi pekerjaan				

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
		Potensi Sumber daya manusia pelaksana kegiatan yang belum kompeten	Kepala OPD	PA/KPA/PPK kurang memahami prosedur dalam pelaksanaan pekerjaan fisik	Internal	C	adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak pelaksanaan	Pemda, Masyarakat	5	2	21	Menempatkan tenaga yang kompeten				
Meningkatnya kualitas jaringan jalan yang menghubungkan seluruh wilayah/Program Penyelenggaraan Jalan	Panjang jalan dalam kondisi mantap	Kegagalan Proses Tender	Kepala OPD dan PPK	Tidak ada penyedia jasa yang memenuhi syarat	Eksternal	U	Pekerjaan tidak terlaksana tepat waktu	Masyarakat penerima manfaat	5	2	21	Mempercepat jadwal pelaksanaan tender	5	2	21	
Meningkatkan Kualitas Penyedia Jasa Konstruksi/Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Cakupan Penyedia Jasa Konstruksi yang memiliki tenaga terampil	Umur konstruksi bangunan tidak tercapai	Kepala OPD dan PPK	Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak	Internal	C	Hasil produksi pertanian menurun	Masyarakat	4	3	17	Meningkatkan pengawasan dilapangan dan melakukan evaluasi melalui SCM	4	3	17	
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan pengendaliannya sesuai peraturan yang berlaku/Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen Kebijakan Penyesuaian RTRW Kabupaten dengan RTRW Provinsi dan Nasional	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan	Kepala OPD dan PPK	Kelalaian Pihak Penyedia	Eksternal	U	Pekerjaan terlambat diterima dan dimanfaatkan	Kepala OPD, PPK, PPTK	5	1	20	Melakukan addendum waktu pelaksanaan kontrak	5	4	24	

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
		Terjadinya forcemajor	Kepala OPD dan PPK	Bencana alam/sosial	Internal/ Eksternal	UC	Pekerjaan tidak dapat dilaksanakan	Masyarakat	5	1	20	Melakukan addendum lokasi pekerjaan				
		Terbatasnya penyedia jasa dan tenaga terampil	Kepala OPD	Rendahnya minat masyarakat menjadi penyedia jasa serta meningkatkan SDM	Eksternal	C	Persaingan Usaha menurun	Pemda	4	3	17	Bekerjasama dengan instansi yang berkompeten untuk melakukan pelatihan barang jasa di wilayah Bolaang Mongondow				
		Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai fungsi	Kepala OPD	Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah	Internal/ Eksternal	C	Lokasi pembangunan digunakan tidak sesuai peruntukan	Pemda	5	5	25	konsultasi Publik kemudian mengadakan FGD dan Sosialisasi Perda ketika Perda sudah ditetapkan				
		Tidak adanya koordinasi tingkat perangkat daerah dengan pemerintah kecamatan serta pemerintah desa	Kepala OPD	kurangnya sosialisasi dalam pelaksanaan penataan ruang untuk masyarakat	Internal/ Eksternal	C	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten	Masyarakat	5	3	22	Sosialisasi dan Penertiban oleh Tim Pengendalian ruang				

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Tidak adanya koordinasi tingkat perangkat daerah dengan pemerintah kecamatan serta pemerintah desa	Kepala OPD	kurangnya sosialisasi dalam pelaksanaan penataan ruang untuk masyarakat	Internal/ Eksternal	C	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten	Masyarakat	5	3	22	Sosialisasi dan Penertiban oleh Tim Pengendalian ruang				
Menurunnya Rumah Tidak Layak Huni	Persentase rumah korban bencana yang tertangani	Masih ada masyarakat yang bermukim di kawasan rawan bencana	Dinas Perkim	tidak ada relokasi perumahan kepada korban bencana dan penduduk di lokasi rawan bencana	Internal	C	Rumah masyarakat hanyut, rusak ringan, maupun rusak berat	Masyarakat	3	4	16	Penyediaan lokasi untuk relokasi korban bencana dan penduduk di lokasi rawan bencana	3	4	16	1. Perubahan Judul Sebab 2. Perubahan judul RTP hal ini dikarenakan ketidaksesuaian penetapan konteks
Program Pengembangan Perumahan		Tidak tertanganinya Rumah Akibat Bencana	Dinas Perkim	Kurangnya Anggaran	Internal	C	penduduk tidak memiliki hunian yang layak	Masyarakat	4	3	17	di masukan di dalam renja tahun untuk menjadi program prioritas	4	4	19	1. Perubahan Judul Sebab 2. Perubahan Judul Dampak 3. Perubahan Skala Dampak hal ini dikarenakan : a. Ketidaksesuaian penetapan konteks b. dampak besar ketika penduduk tidak memiliki rumah

REGISTER RESIKO											Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat	
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
Menurunnya Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	Calon penerima Hibah tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan	Dinas Perkim	tidak melaksanakan evaluasi data calon penerima hibah sesuai dengan SOP	Internal	C	Hibah yang diberikan tidak termanfaatkan secara optimal	1. Dinas PERKIM 2. Masyarakat	4	4	19	1. Melaksanakan MONEV terkait penetapan calon penerima hibah 2. Melaksanakan Penyaluran Hibah sesuai ketentuan				1. Perubahan Judul Sebab 2. Perubahan judul RTP hal ini dikarenakan ketidaksesuaian penetapan konteks
Program Kawasan Permukiman		Penyerahan Hibah tidak tepat sasaran	Dinas Perkim	Kelalaian PPK/PPTK	Internal	C	Terindikasi Kerugian Keuangan Negara/Daerah	1. Dinas PERKIM 2. Masyarakat	4	4	19	1. Memberikan sanksi kepada pihak terkait sesuai ketentuan 2. Melaksanakan Penyaluran hibah sesuai ketentuan				1. Perubahan judul risiko 2. Perubahan judul Dampak 3. Perubahan judul RTP Hal ini dikarenakan ketidaksesuaian penetapan konteks
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Calon penerima Hibah tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan	Dinas Perkim	tidak melaksanakan evaluasi data calon penerima hibah sesuai dengan SOP	Internal	C	Hibah yang diberikan tidak termanfaatkan secara optimal	1. Dinas PERKIM 2. Masyarakat	4	4	19	1. Melaksanakan MONEV terkait penetapan calon penerima hibah 2. Melaksanakan Penyaluran Hibah sesuai ketentuan	4	4	19	1. Perubahan judul sebab 2. Perubahan Judul RTP hal ini dikarenakan ketidaksesuaian penetapan konteks

REGISTER RESIKO											Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat (Jika terdapat perubahan nilai risiko)	
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
		Penyerahan Hibah tidak tepat sasaran	Dinas Perkim	Kelalaian PPK/PPTK	Internal	C	Terindikasi Kerugian Keuangan Negara/Daerah	1. Dinas PERKIM 2. Masyarakat	4	4	19	1. Memberikan sanksi kepada pihak terkait sesuai ketentuan 2. Melaksanakan Penyaluran hibah sesuai ketentuan				1. Perubahan judul dampak 2. Perubahan judul RTP hal ini dikarenakan ketidaksesuaian penetapan konteks
Menurunnya Permukiman Kumuh	Persentase Penyediaan PSU Hunian yang Terbangun	Keterlambatan Proses Lelang	Kepala Dinas Perkim	Kelalaian PPK	Internal	C	Terjadi Keterlambatan pekerjaan	1. Dinas PERKIM 2. Masyarakat	3	4	16	Penyusunan Dokumen Perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan harus tepat waktu dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.				1. Perubahan skala dampak, kemungkinan, dan nilai risiko 2. Perubahan judul RTP hal ini dikarenakan ketidaksesuaian penetapan konteks
Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		Pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi	Kepala Dinas Perkim	Kurangnya Pengawasan, Kelalaian PA/PPK/PP TK	Internal	C	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	1. Dinas PERKIM 2. Penyedia 3. Masyarakat	3	4	16	Melaksanakan Pengawasan secara berkala sesuai dengan jadwal pekerjaan	3	4	16	1. Perubahan skala dampak, kemungkinan, dan nilai risiko 2. Perubahan judul RTP hal ini dikarenakan : a. dampak dari TGR, histori kejadian b. ketidaksesuaian penetapan konteks

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
Meningkatnya fungsi Kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana / Program Penanggulangan Bencana	Persentase Desa dan Kelurahan yang terlatih dalam menghadapi Bencana	Tidak teridentifikasinya jumlah personil di wilayah desa dan Kelurahan yang tangguh Bencana	Kepala Daerah	-Tidak terlaksananya Sosialisasi dan Pelatihan Relawan Desa Tangguh Bencana - Kurangnya data dan Informasi Kebencanaan	Internal	C	Menimbulkan jatuhnya korban jiwa	Masyarakat	4	4	19	1. Melakukan Pendataan jumlah kapasitas personil Kebencanaan 2. Menambah tenaga ahli Kebencanaan 3. Meningkatkan Kapabilitas Tenaga Ahli kebencanaan				
	Persentase Jumlah korban Bencana yang ditangani	Tingginya jumlah korban yang terdampak bencana	Kepala OPD	Kurangnya peralatan penunjang dalam penanganan darurat bencana	Internal	C	- Terlambatnya Penanganan Evakuasi Korban dan menimbulkan jatuhnya korban jiwa	Masyarakat	4	4	19	1. Penambahan personil Tim Reaksi Cepat (TRC) 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kegiatan Operasional Respon Cepat	3	4	16	
		Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Darurat bencana kurang memperhatikan SOP dalam upaya penyelamatan dan Evaluasi Korban	Kepala OPD	Kurangnya pemahaman personil dalam melaksanakan kegiatan penyelamatan Evaluasi Korban Bencana	Internal	C	Penanganan Korban Bencana tidak Optimal dan jatuhnya banyak korban	Masyarakat	1	4	6					

REGISTER RESIKO											Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat	
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)	
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
		Kurangnya kecepatan/ Respon cepat bencana dalam upaya penyelamatan dan Evaluasi korban Bencana pada saat keadaan Darurat	Kepala OPD	Kurangnya pelatihan dan simulasi upaya penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana	Internal	C	Evakuasi Masyarakat	Korban Bencana tidak optimal dan menimbulkan korban jiwa	2	3	10					
Pulihnya sarana/prasarana Dampak Pasca Bencana/ Program Penanggulangan Bencana	Persentase Infrastruktur Pasca Bencana yang direhabilitasi dan rekonstruksi	Bertambahnya jumlah wilayah yang terdampak Bencana	Kepala OPD	- Identifikasi wilayah pasca Bencana oleh Tim Jtupasna belum memadai - Adanya kebijakan moneter daerah	Internal	C	Bertambahnya cakupan wilayah terdampak bencana	Masyarakat	4	4	19	Melakukan Verifikasi usulan kegiatan Rehab Rekon berdasarkan skala Prioritas				
		Verifikasi dan Observasi wilayah terdampak bencana belum maksimal	Kepala OPD	Kurangnya SDM Tenaga ahli Teknis yang memahami proses identifikasi wilayah yang terdampak Bencana	Internal	C	Penanganan Korban Bencana tidak Optimal dan menimbulkan jatunya banyak korban jiwa	Masyarakat	1	4	6					
Meningkatnya kualitas Air, Udara dan tutupan lahan / Program Perencanaan	Adanya Perda RPPLH dan Dokumen KLHS	Kurang efektifnya Upaya Pengendalian Pencemaran dan	Kepala OPD	Belum adanya Perda RPPLH	Internal	UC	1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan	1. Pemerintah Daerah 2. Masyarakat	3	4	16	Mengusulkan Penetapan Peraturan Daerah Tentang RPPLH	3	4	16	1. Perubahan Judul dampak 2. Perubahan skala dampak 3. Perubahan judul RTP hal ini dikarenakan :

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
Lingkungan Hidup		Kerusakan lingkungan					Lingkungan Hidup tidak dapat dilaksanakan secara optimal. 2. Penurunan Indeks kualitas lingkungan hidup									a. dampak ketika terjadinya kerusakan b. ketidaksesuaian penetapan konteks
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pengendalian terhadap lokasi Pencemaran / Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Indikasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Kepala Dinas	Terbatasnya Jumlah Lokasi Pengujian Kualitas Lingkungan	Internal	UC	1. Tidak diketahui kualitas lingkungan 2. Penurunan Indeks kualitas lingkungan hidup	1. Pemerintah Daerah 2. Masyarakat	3	4	16	Koordinasi dengan instansi teknis terkait dalam pengujian kualitas lingkungan				1. perubahan judul dampak 2. Perubahan skor dampak 3. Perubahan judul RTP hal ini dikarenakan : a. Ketidaksesuaian penetapan konteks b. dampak lingkungan yang tidak diketahui kualitasnya
		Kurang efektifnya upaya penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap indikasi pencemaran dan atau kerusakan LH	Kepala Dinas	Belum difungsikan laboratorium Lingkungan karena keterbatasan peralatan dan SDM	Internal	UC	1. penanganan Pengaduan Masyarakat tidak ditindaklanjuti. 2. Pencegahan Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1. Pemerintah Daerah 2. Masyarakat	3	4	16	1. Meningkatkan SDM dan Sarana Prasarana pendukung . 2. Membuat SOP dalam pelaksanaan pengaduan masyarakat	3	4	16	1. perubahan judul dampak 2. Perubahan skor dampak 3. Perubahan judul RTP hal ini dikarenakan : a. Ketidaksesuaian penetapan konteks b. dampak lingkungan yang tidak diketahui kualitasnya

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
							tidak terlaksana									
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Presentase Ruang terbuka hijau Yang di kelola	Kurang maksimal upaya penataan RTH	Kepala Dinas	Kurangnya Tenaga Kerja Pengelolah	Internal	C	Penurunan Fungsi RTH	1. Pemerintah Daerah 2. Masyarakat	3	3	14	Menambah SDM dalam melaksanakan pengawasan fungsi RTH	3	3	14	1. Perubahan Skala Dampak 2. Perubahan judul RTP hal ini dikarenakan : a. Dampak besar jika ruang terbuka hijau menurun fungsinya b. Ketidaksesuaian penetapan konteks
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3)	Cakupan Pengendalian B3 dan LB3	Kurang efektifnya Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Kepala Dinas	Kurangnya Tenaga Kerja Pengelolah	Internal	C	Penurunan Fungsi RTH	1. Pemerintah Daerah 2. Masyarakat	3	3	14	Menambah SDM dalam melaksanakan pengawasan fungsi RTH	3	3	14	1. Perubahan Skala Dampak 2. Perubahan judul RTP hal ini dikarenakan : a. Dampak besar jika ruang terbuka hijau menurun fungsinya b. Ketidaksesuaian penetapan konteks
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Cakupan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Kurang efektifnya Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Kepala Dinas	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup belum berfungsi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Internal	C	pengawasan terhadap lingkungan hidup tidak memadai	pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak dapat dikendalikan	4	4	19	1. Peningkatan SDM Pejabat Pengawas 2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang tidak melaksanakan TUPOKSI	4	4	19	1. Perubahan judul dampak 2. Perubahan skor dampak 3. Perubahan judul RTP hal ini dikarenakan : a. ketidaksesuaian penetapan konteks b. dampak ketika lingkungan tidak memadai
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang	Presentase Pengakuan terhadap keberadaan MHA yang	Terkikisnya nilai-nilai kearifan lokal terhadap upaya Perlindungan dan	Kepala Dinas	Belum adanya Pengakuan atas kedudukan Keberadaan Masyarakatan Hukum Adat	1. Internal 2. External	C	hukum adat yang tidak lagi dapat dipertahankan akan senyap dengan	1. Pemerintah Daerah 2. Masyarakat	4	2	13	1. Membuat Peraturan Bupati Tentang Kedudukan dan keberadaan Masyarakat Hukum Adat 2. Melakukan	4	2	13	

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
terkait dengan PPLH	terkait PPLH	Pengelolaan Lingkungan Hidup					berjalannya waktu dan hilangnya instrumen penting sebagai pintu penjaga lingkungan hidup di suatu wilayah.					Sosialisasi kepada pihak terkait				
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Presentase Kader Peduli Lingkungan yang ditingkatkan wawasannya	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kepala Dinas	informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak tersampaikan	1. Internal 2. External	C	Lingkungan Menjadi kotor, mudah terserang penyakit dan tidak nyaman untuk ditinggali	1. Pemerintah Daerah 2. Masyarakat	4	3	17	1. Meningkatkan SDM Kader Peduli lingkungan. 2. Membuat SOP terkait peduli lingkungan. 3. Mensosialisasikan kepada masyarakat dampak dari lingkungan yang kotor.	4	3	17	
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Akumulasi Jumlah Masyarakat yang mendapat Penghargaan Lingkungan Hidup	Menurunnya Partisipasi Masyarakat dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kepala Dinas	tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Internal	C	Peningkatan Indikasi Pencemaran dan Kerusakan LH	1. Pemerintah Daerah 2. Masyarakat	3	3	14	1. membuat peraturan terkait peduli lingkungan 2. memberikan penghargaan kepada masyarakat peduli lingkungan. 3. memerikan sanksi kepada masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam upayah peduli lingkungan.P	3	3	14	

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat (Jika terdapat perubahan nilai risiko)
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Çakupan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Adanya laporan masyarakat tentang indikasi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan tidak ditindaklanjuti	Kepala Dinas	tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang Pejabat pelaksana penanganan pengaduan dan TUPOKSI	Internal	C	Meningkatnya indikasi pencemaran dan kerusakan lingkungan	1. Pemerintah Daerah 2. Masyarakat	2	4	12	Mengusulkan RANPERDA tentang Pelayanan Kebersihan.	2	4	12	
Program Pengelolaan Persampahan	Presentase Penanganan Sampah	Tidak terlaksananya penanganan sampah	Kepala Dinas	Terbatasnya sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan	Internal	C	1. Penurunan Kualitas lingkungan 2. Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan	1. Pemerintah Daerah 2. Masyarakat	3	4	16	1. Mengusulkan RANPERDA tentang Pelayanan Kebersihan 2. Meningkatkan Sarana dan Prasaran pendukung penanganan sampah	3	4	16	
Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Persentase Pengelolaan Energi Terbarukan Berdasarkan Potensi	tidak ada investor yang berinvestasi	Kepala Dinas Perdagangan dan ESDM	Energi baru terbarukan belum dikelola secara profesional	Internal	C	tidak ada pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	Pemerintah / Masyarakat	5	2	20	Melakukan kajian teknis pengelolaan energi baru terbarukan	5	3	22	
Program Pengelolaan Energi Baru terbarukan		Energi baru terbarukan tidak dikelola secara profesional	Kepala Dinas Perdagangan dan ESDM	Tidak memiliki tenaga ahli profesional	Internal/ Eksternal	C	Berkurangnya sumber pendapatan asli daerah.	Pemerintah dan Masyarakat	5	4	24	Penyediaan SDM dan Anggaran pelatihan sertifikasi untuk energi baru terbarukan				
Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	persentase pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan	pelaku usaha tidak memiliki izin usaha	Kepala Dinas Perdagangan dan ESDM	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus izin usaha	Internal / eksternal	C	tidak memperoleh tambahan pendapatan	Pemerintah / Masyarakat	5	4	24	melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang	5	4	24	

REGISTER RESIKO											Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena							
	toko swalayan yang terdaftar dan memiliki ijin usaha						n negara / daerah								
	0	Pelaku usaha tidak membayar pajak	Kepala Dinas Perdagangan dan ESDM	Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan perdagangan	Internal / eksternal	C	target capaian pendapatan daerah / negara tidak tercapai	Pemerintah / Masyarakat	5	4	24				
Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Jumlah sarana perdagangan yang berfungsi (pasar)	Sarana perdagangan (pasar) belum sesuai standar pasar rakyat yang berdaya saing	Kepala Dinas Perdagangan dan ESDM	kondisi sarana perdagangan (pasar) yang kurang terpelihara serta belum tertata sesuai peruntukannya	Internal/ Eksternal	C	Penurunan aktivitas jual beli di tingkat pasar	masyarakat	5	3	22	Membuat SOP Kemandirian Penataan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Pasar)	5	3	22
Program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien variasi harga bahan pokok dan barang penting secara antar waktu	Kurangnya ketersediaan pasokan Bapok	Kepala Dinas Perdagangan dan ESDM	1. Alur distribusi atau rantai pasok bapok yang kurang efektif. 2. Kebijakan ekspor/imp ort untuk komoditas bahan baku dan produk pabrikan serta faktor iklim.	Internal/ Eksternal	C	stabilitas harga bapok tidak terkendali kan serta kurangnya ketersediaan pasokan	Pemerintah / Masyarakat	5	4	24	membangun kerjasama dengan pihak Stake Holder (distributor Bapok)	5	4	24

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
	0	Disparitas harga yang tinggi secara antar pulau, daerah, propinsi dan pusat	Kepala Dinas Perdagangan dan ESDM	tidak masuk program TOL LAUT	Internal/ Eksternal	UC	harga jual Bapak tinggi untuk komoditas import	masyarakat	5	4	24	Diusulkan ke Kemendag agar Pelabuhan di Kab. Bolmong menjadi pelabuhan pendukung Tol Laut				
Program pengembangan ekspor	Jumlah pelaku usaha yang sudah dilakukan ekspor komoditi unggulan	tidak terpasarkannya produk unggulan kabupaten bolaang mongondow	Kepala Dinas Perdagangan dan ESDM	terbatasnya anggaran promosi untuk produk unggulan kabupaten bolaang mongondow	Internal	C	tidak terpromosinya produk unggulan bolmong dan tidak ada peningkatan kesejahteraan terhadap pelaku usaha	Pemerintah dan Masyarakat	5	4	24	Melakukan Pemasaran Produk Unggulan Kab Bolmong secara Rutin				
	0	Produk unggulan dan kearifan lokal kurang diminati pasar ekspor	Kepala Dinas Perdagangan dan ESDM	belum ada dan atau kurangnya pelatihan inovasi produk	Internal / Eksternal	C	Tidak ada peningkatan kesejahteraan Pelaku Usaha IKM/UMKM di Kab Bolaang Mongondow	Pemerintah / Masyarakat	5	5	25	Melakukan Promosi Produk Unggulan Kab Bolmong secara rutin	5	4	24	
		pelaku usaha ekspor daerah kurang mampu menembus persaingan pasar ekspor	Kepala Dinas Perdagangan dan ESDM	masih kurang fasilitas dokumen ekspor bagi pelaku usaha/calon atau eksportir daerah serta komoditi	Internal/ Eksternal	C	rendahnya peluang bagi pelaku usaha/eksportir daerah untuk melakukan kerjasama	masyarakat	5	4	24	Melakukan Pembinaan Pelaku Usaha secara Maksimal				

REGISTER RESIKO											Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat	
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
		yang kompetitif		atau produk unggulan daerah masih kurang			dagang di pasar ekspor.									
program standarisasi dan perlindungan konsumen.	persentase capaian tera dan tera ulang	banyak konsumen yang mengkonsumsi produk kadarluarsa	Kepala Dinas Perdagangan dan ESDM	kurangnya pengawasan, sosialisasi dan edukasi berulang terhadap pelaku usaha dan masyarakat.	Internal	C	terganggunya kesehatan pada masyarakat	masyarakat	5	4	24	Pengawasan dan Pemeriksaan Barang dalam Keadaan Terbungkus secara rutin dan berulang				
		Kesalahan ukuran dalam proses jual beli	Kepala Dinas Perdagangan dan ESDM	Alat ukur takar timbang yang digunakan tidak ditera ulang	Internal	C	merugikan konsumen dan atau penjual.	Konsumen/ Masyarakat	5	4	24	Pengawasan dan Pemeriksaan Alat Ukur Takar Timbang secara Rutin dan Berulang.	5	4	24	
		Kurangnya jumlah alat ukur takar timbang yang ditera	Kepala Dinas Perdagangan dan ESDM	tidak ada data pelaku usaha yang memiliki alat ukur takar timbang	Internal/ Eksternal	C	Kesalahan pengukuran dalam transaksi jual beli	Konsumen/ Masyarakat	5	4	24	Melakukan Tera-Tera Ulang terhadap alat ukur takar timbang secara rutin dalam setiap tahun berjalan				
	0	Minimnya pahaman pelaku usaha tentang pelaksanaan tera Alat Ukur Takar Timbang yang ditera	Kepala Dinas Perdagangan dan ESDM	Kurangnya sosialisasi Perundang-undangan tentang Tera-tera Ulang terhadap Pelaku Usaha	internal/ eksternal	C	Kesalahan pengukuran dalam transaksi jual beli	pemerintah / masyarakat	5	4	24	Melakukan Sosialisasi UU Metrologi terhadap Pelaku Usaha secara rutin				

REGISTER RESIKO											Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat	
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
Meningkatnya Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah Dokumen Tersusunnya dan Terevaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab./Kota	Tidak terpetakan sumber-sumber Daya Industri yang bisa dikelola	Kepala Dinas Perdagangan dan ESDM	Belum adanya RoadMap sektor basis di Perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow	Internal/ Eksternal	C	Penggangaran Kegiatan tidak tepat sasaran	Masyarakat dan Pelaku Usaha	5	3	22	Melakukan Pemetaan Sumber Daya Industri secara rutin				
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		Pelaku Usaha tidak percaya untuk melakukan kegiatan Industri	Kepala Dinas Perdagangan dan ESDM	Peraturan Daerah Tentang tataruang belum mengakomodir tataruang secara komprehensif	Internal / Eksternal	C	pembangunan industri tidak terlaksana dengan baik	Pemerintah	5	4	24	melakukan promosi dan Edukasi Pelaku Usaha tentang kelebihan dan keuntungan Kegiatan Industri di Kabupaten Bolmong	5	4	24	
		Pencemaran lingkungan	Kepala Dinas Perdagangan dan ESDM	tidak adanya pemantauan berkala terkait AMDAL kegiatan industri	Internal/ Eksternal	C	kerusakan kesehatan lingkungan dan masyarakat	pemerintah / masyarakat	5	4	24	Melakukan Sosialisasi Undang-Undang Lingkungan terhadap Pelaku usaha				
Program Pelayanan Izin simpan Pinjam	Persentase Pelayanan Izin Simpan Pinjam	Tidak akan diketahui Koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM	adanya Koperasi yang tidak patuh pada aturan	Eksternal	C	Koperasi tidak akan berjalan dengan baik	Lembaga Koperasi	4	4	19	Melakukan Sosialisasi tentang Pentingnya Izin Usaha Simpan Pinjam				
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi aktif dan Berkwalitas	Tidak dapat diketahui koperasi yang tidak aktif	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM	Koperasi tidak pernah melapor	Eksternal	C	Managemen Koperasi Tidak Sehat	Lembaga Koperasi	4	4	19	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Management Koperasi	4	4	19	

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	Persentase Koperasi KSP/USP Koperasi yang Aktif	Pengadministrasian Koperasi tidak dapat diketahui	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM	Sumber Daya Managemen t Koperasi	Eksternal	C	Koperasi Tidak Sehat	Lembaga Koperasi	4	4	19	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Management Koperasi	4	4	19	
Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase SDM yang diberikan Pelatihan Perkoperasian	Koperasi tidak akan mandiri	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM	Sumber Daya Managemen t Koperasi	Eksternal	C	Koperasi Tidak Sehat	Lembaga Koperasi	4	4	19	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Management Koperasi	4	4	19	
		Koperasi tidak akan Sehat	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM	Karena tidak ada kemampuan bersaing dengan koperasi lainnya	Eksternal	C	Sumber Koperasi Ketidakmampuan	Lembaga Koperasi	2	2	7					
		Koperasi tidak akan transparan kepada Kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM	Tidak ada upaya dalam pengelolaan Koperasi	Eksternal	C	Sumber Daya Koperasi Ketidakmampuan	Lembaga Koperasi	4	4	19	Melakukan Pelatihan bagi anggota Koperasi agar dapat memahami tentang Perkoperasian				
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase yang diberdayakan dan Dilindungi	Kurangnya SDM Pelaku Usaha	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM	Tidak mengikuti pelatihan, tidak mengikuti perkembangan jaman, tiak mengurus izin usaha	Internal	C	Sumber Daya Pelaku UMKM	Pelaku Usaha	2	2	7		2	2	7	

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat (Jika terdapat perubahan nilai risiko)
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Modal Usaha	Apabila UMKM Tidak Dikembangkan maka akan terjadi Kesenjangan Ekonomi	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM	tidak adanya pelatihan bagi UMKM	Internal	C	Sumber daya Pelaku UMKM	Pelaku Usaha	3	3	14	Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM	3	3	14	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan usaha Mikro	Persentase Usaha kecil dan Menengah yang diberdayakan	Usaha Tidak akan berjalan, Berkembang dan tidak maju dan akan berdampak pada ekonomi regional	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM	Tidak adanya Pelatihan bagi UMKM	Internal	C	Sumber daya Pelaku UMKM	Pelaku Usaha	4	2	13	Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM	4	2	13	
Meningkatnya produksi tanaman perkebunan/Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tersedianya Varietas benih/bibit tanaman perkebunan yang bersertifikat	Petani tidak memperoleh bibit tanaman perkebunan sesuai kebutuhan	Kepala Dinas Perkebunan	1. Terbatasnya anggaran untuk pengadaan bibit tanaman perkebunan 2. Terbatasnya modal petani untuk membeli bibit tanaman perkebunan	Internal dan Eksternal	C	1. Luas lahan Tanam Tanaman Perkebunan tidak tercapai 2. Hasil Produksi Tidak maksimal/Rendah	Pemerintah Desa dan Petani	4	2	13	Koordinasi dengan pihak Pemerintah Desa dan Verifikasi kelompok tani serta observasi kondisi lapangan	11	6	13	
Meningkatnya produksi tanaman perkebunan/Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tersedianya Varietas benih/bibit tanaman perkebunan yang bersertifikat	Pengolahan Lahan oleh Petani tidak Maksimal karena fasilitas terbatas	Petani	Kurangnya Peralatan/Fasilitas Penunjang bagi petani	Internal dan Eksternal	C	Hasil Perduksi tidak Maksimal	Pemerintah Desa dan Petani	3	2	11	Mengusulkan anggaran pengadaan peralatan dan mesin pertanian kepada pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas				

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
Meningkatnya produksi tanaman perkebunan/Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tersedianya Varietas benih/bibit tanaman perkebunan yang bersertifikat	Penerima bantuan tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan	Kepala Dinas Perkebunan	Kelalaian Tim/petugas verifikasi (CPCL) calon penerima bantuan	Internal	C	1. Bansos tidak tepat sasaran 2. Bantuan tidak ada asas manfaat 3. Tenaga lapangan terbatas	1. Petani 2. Dinas Perkebunan Bolmong	4	2	13	Melakukan Pemetaan dan Survey Awal Lapangan, Koordinasi dengan pihak Pemerintah Desa dan kelompok tani serta observasi lapangan				
Meningkatnya produksi tanaman perkebunan/Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana Pertanian	Terselenggaranya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	Kepala Dinas Perkebunan	Faktor Iklim (Curah Hujan terlalu tinggi) 2. Kelalaian pihak ketiga/Pihak penyedia	Eksternal	C	1. Kegiatan Tidak Memenuhi Target Volume 2. Kualitas Pekerjaan tidak sesuai Standar yang telah ditetapkan	1. Petani 2. Dinas Perkebunan Bolmong	4	3	17	Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pekerjaan oleh Pelaksana Teknis Kegiatan.	4	3	17	
Meningkatnya produksi tanaman perkebunan/Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana Pertanian	Terselenggaranya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Rekanan tidak mengerjakan sesuai spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak	Kepala Dinas Perkebunan	Kelalaian Pihak penyedia	Eksternal	C	Kualitas Pekerjaan Tidak sesuai dengan Target dan Spesifikasi dan mengakibatkan kerugian keuangan Daerah	1. Petani 2. Dinas Perkebunan Bolmong	4	2	13	Pemilihan dan seleksi pihak penyedia yang kompeten dan dilakukan secara transparan				
Meningkatnya produksi tanaman perkebunan/Program Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian	Terselenggaranya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	HPS disusun terlalu Rendah	Kepala Dinas Perkebunan	Kelalaian Tim Kerja PPK dalam melakukan perencanaan	Internal	C	1. Gagal Tender	1. Petani 2. Dinas Perkebunan Bolmong	4	3	17	Mengusulkan kembali harga satuan yang telah disesuaikan berdasarkan hasil survey pasar	4	3	17	

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
	Terselenggaranya penyuluhan pertanian	Terjadinya kerusakan peralatan pendukung kegiatan penyuluhan	Kepala Dinas Perkebunan	Kurangnya pemeliharaan atas peralatan kerja	Internal/ Eksternal	C	kegiatan penyuluhan terlambat diselesaikan dan masyarakat tidak puas atas pelayanan yang diterima	1.Petani 2. Dinas Perkebunan Bolmong	3	3	14	Buat SOP Pengaduan Kerusakan dan Pemeliharaan Peralatan	3	3	14	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun	RISK 1.1 : Kapasitas Kelembagaan dan Kewirausahaan Desa tidak berkembang	Kepala OPD	sebab 1 : Penguasaan kemampuan manajerial yang kurang memadai serta hampir semua BUMDES memiliki Usaha yang sama.	Eksternal	C	dampak 1 : Kerugian Keuangan dalam Pengelolaan Keuangan BUMDES	Pemerintah dan masyarakat	4	4	19	Dilaksanakan Bimtek Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan				
Program Peningkatan Kerjasama Desa		RISK 1.2 : Aset BUMDES tidak dipertanggung jawabkan.	Kepala OPD	sebab 2 : Adanya transisi Kepemimpinan di desa.	Eksternal	C	Aset BUMDES tidak terdata / hilang.	Pemerintah dan masyarakat	4	4	19	Dilaksanakan Diklat tentang manajemen Aset Bumdes	4	4	19	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Masyarakat Desa	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Adat	RISK 2.1 Tidak adanya Laporan Program Kegiatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kepala OPD	Seksi atau Penggerak Swadaya Masyarakat pada Program tersebut belum terisi / kosong pada instansi.	Internal	C	serapan dana yang tidak terpakai / tidak dianggarkan.	OPD terkait dan masyarakat (kelompok).	4	4	19	Mengusulkan kepada pimpinan OPD untuk pengisian personil pada posisi Program dimaksud, tembusan BKPP				

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat (Jika terdapat perubahan nilai risiko)
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Umum		RISK 2.2 Penurunan Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada Desa.	Kepala OPD	Tidak adanya legalitas dari Pemerintah Desa, dan insentif tidak tertata dalam Keuangan Desa.	Eksternal	c	Rendahnya Peran Lembaga Adat dalam aktivitas pemerintahan Desa.	OPD terkait dan masyarakat (kelompok).	3	3	14	Sosialisasi tentang manfaat, Topoksi dan pentingnya keberadaan dan peran LPM	3	3	14	
			Kepala OPD	Tidak adanya legalitas dari Pemerintah Desa, dan insentif tidak tertata dalam Keuangan Desa.	Eksternal		Rendahnya Peran Lembaga Adat dalam aktivitas pemerintahan Desa.	OPD terkait dan masyarakat (kelompok).	3	3	14	Sosialisasi tentang manfaat, Topoksi dan pentingnya keberadaan dan peran LPM				
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Masyarakat Desa	Persentase jumlah Desa yang kewenangannya tertata.	Pemerintah dan masyarakat Desa belum memahami kewenangan yang dimiliki	Kepala OPD	Kurangnya sosialisasi terkait dengan kewenangan Desa	Internal	C	Desa tidak maksimal dalam melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa	Pemerintah dan masyarakat Desa	4	4	19	Dilaksanakan Workshop tentang penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa	5	5	25	
Program Penataan Desa		Desa tidak memiliki dokumentasi tentang batas Desa	Kepala OPD	Belum adanya penetapan dan penegasan batas Desa	Eksternal	C	Konflik antar Desa terkait penetapan Batas Desa	Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat Desa	5	5	25	Fasilitasi penetapan dan penegasan Batas Desa dengan usulan dibentuk Pokja dengan anggota stake holder terkait Penetapan Batas Desa				

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Masyarakat Desa	Persentase pelaksanaan program Administrasi Pemerintahan Desa	Pengelolaan keuangan Desa belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kepala OPD	Kurangnya pemahaman Pemerintah Desa tentang pengelolaan keuangan Desa	Eksternal	C	Pengelolaan keuangan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Pemerintah Desa	4	5	23	Fasilitasi penyusunan APB Desa dan monitoring pengelolaan keuangan Desa	4	4	19	
Program Administrasi Pemerintahan Desa		Dokumen perencanaan pembangunan Desa disusun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kepala OPD	Pemerintah Desa tidak serius dalam penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Desa	Eksternal	C	Pembangunan Desa tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat	Masyarakat Desa	3	3	14	Workshop dan Monitoring penyusunan dokumen perencanaan Desa				
		Perkembangan Desa tidak dapat dievaluasi	Kepala OPD	Pemerintah Desa tidak serius dalam melakukan pemutakhiran data profil Desa	Eksternal	C	Desa tidak memiliki status perkembangan	Pemerintah Desa	4	4	19	Bimbingan teknis (Bimtek) dan Monitoring tata cara pengisian profil Desa				
		Sangadi dan Perangkat Desa bermasalah dalam pengelolaan keuangan Desa	Kepala OPD	Pengelolaan keuangan Desa tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Eksternal	UC	Sangadi dan Perangkat Desa terjerat hukum	Pemerintah Desa	4	2	13	Sosialisasi tentang undang-undang / ketentuan terkait Pengelolaan Keuangan Desa kepada Sangadi dan Perangkat				

REGISTER RESIKO											Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat (Jika terdapat perubahan nilai risiko)
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena							
Meningkatnya Pelayanan Publik	Jumlah Pelaku Usaha	Barang/Jasa yang diadakan tidak sesuai Kebutuhan	Kepala Dinas PMPTSP	Tidak kompetennya Tim kerja PPK dalam pengadaan barang dan jasa	Internal	C	Barang/jasa yang diadakan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal	Dinas PMPTSP	3	3	14	3	3	14	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		waktu penyelesaian pekerjaan yang di rencanakan tidak sesuai target	Kepala Dinas PMPTSP	Kelalaian Pihak Penyedia Jasa	Eksternal	C	Barang tidak dapat dimanfaatkan pada saat yg dibutuhkan	Dinas PMPTSP	3	3	14				
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor yang Mengurus Perijinan	Jumlah pengunjung pameran investasi tidak sesuai target	Kepala Dinas PMPTSP	Informasi tentang pelaksanaan pameran investasi tidak tersebar luas	Internal	C	Kurangnya Masuk Investor dalam Daerah	Dinas PMPTSP	2	3	10	2	3	10	
		Pelaksanaan promosi melalui media cetak dan elektronik kurang menarik investor	Kepala Dinas PMPTSP	Profil investasi yang dihasilkan kurang menarik	Internal	C	Profil Investasi yang ingin di Promosikan tidak sesuai	Masyarakat	2	2	7				

REGISTER RESIKO											Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena							
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang memiliki ijin usaha	Gangguan pada aliran listrik menghambat pelayanan	Kepala Dinas PMPTSP	Sering padamnya aliran listrik	Internal/ Eksternal	C	Keterlambatan Pelayanan Kepada Pelaku Usaha sehingga tidak sesuai waktu yang sesuai SOP	Masyarakat	2	3	10				
		Gangguan pada jaringan internet menghambat pelayanan	Kepala Dinas PMPTSP	Kurangnya Pemeliharaan Jaringan Oleh Provider	Internal/ Eksternal	C	Pelayanan tidak sesuai dengan Waktu	Masyarakat	2	2	7	2	3	10	
		Pelayanan yang diterima masyarakat tidak sesuai SOP	Kepala Dinas PMPTSP	Petugas pelayanan yang lalai dalam mengikuti SOP	Internal/ Eksternal	C	Pelayanan Tidak tepat Waktu, Tidak Akurat, dan Rendahnya Kepuasan Masyarakat	Masyarakat	3	3	14			Menambah dan meningkatkan SDM Petugas Pelayanan	

REGISTER RESIKO											Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat	
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Permasalahan/Pengaduan yang diselesaikan	Pengurusan perizinan oleh masyarakat dengan menggunakan calo	Kepala Dinas PMPTSP	Masyarakat yang enggan mengurus sendiri perizinannya	Eksternal	C	Masyarakat Terbebani dengan Biaya Tambahan untuk Perantara/Calo	Masyarakat	3	3	14					
		Jumlah peserta pembinaan tidak memenuhi target	Kepala Dinas PMPTSP	Para peserta pembinaan tidak menerima undangan tepat waktu	Eksternal	C	Pelaku Usaha Kurang Memahami tentang Materi Pembinaan	Masyarakat	3	3	14		3	3	14	
		Keterbatasan/Kurangnya Tim Pengawasan	Kepala Dinas PMPTSP	Jumlah personil tim pengawasan tidak sesuai target	Internal	C	Pelaporan Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal tidak Maksimal	Dinas PMPTSP	2	2	7					
Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan																

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
Program Pendaftaran Penduduk	Presentase capaian pendaftaran penduduk	Banyak masyarakat yang belum Memiliki Dokumen Administrasi kependudukan	Kepala DisDuk Capil	Kurangnya kesadaran penduduk tentang pentingnya pendaftaran status kependudukan	Eksternal	C	Masih banyak masyarakat yang tidak memiliki dokumen kependudukan	Masyarakat, Kemenag, Imigrasi, Bapelitbangda, BPJS, Dinsos, Perbankan, KPU, Dinkes, Diknas Dinas DukCapil, Asuransi	4	4	19	1. Pemenuhan Anggaran sesuai kebutuhan 2. Mendekatkan pelayanan di Desa (Penerapan LABD secara menyeluruh)	4	4	19	
		Banyak masyarakat yang belum paham tentang persyaratan pendaftaran status kependudukan	Kepala DisDuk Capil	Kurangnya sosialisasi Tentang SOP (Standart Operasional Prosedur) dan SPP (Standart Persyaratan Pelayanan)	Internal	C	capaian target pendaftaran dokumen kependudukan belum tercapai	Kepala DisDuk Capil Masyarakat	4	4	19	1. Melakukan Sosialisasi lebih intens melalui media cetak dan media elektronik 2. Melakukan sosialisasi kepada perangkat-perangkat Desa untuk diteruskan kepada masyarakat				
Program Pencatatan Sipil	Presentase capaian pencatatan sipil	pasangan menikah tidak mau mendaftarkan pernikahannya	Kepala OPD	Karena kurangnya kesadaran Masyarakat tentang pentingnya Akta Perkawinan	Eksternal	C	Masih banyak masyarakat yang kawin tidak tercatat dan tidak memiliki akta perkawinan dan capaian target dokumen kependudukan tidak tercapai	Kepala DisDuk Capil, Dinas PP dan PA, Dinsos, Bapelitbangda Masyarakat	4	3	17	Melaksanakan pencatatan masal di setiap kecamatan	5	4	24	

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
		Pelaporan Peristiwa kelahiran dan kematian dari masyarakat masih kurang	Kepala DisDuk Capil	Karena Masyarakat masih kurang paham tentang pentingnya Akta Kematian dan Kelahiran	Eksternal	C	Banyak masyarakat yang tidak memiliki akta kematian	Masyarakat, Kemenag, Imigrasi, Bapelitbangda BPJS, Dinsos, Perbankan, KPU, Dinkes, Diknas Dinas DukCapil, Asuransi	5	4	24	Mendekatkan pelayanan di Desa (Penerapan LABD secara menyeluruh)				
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Tidak semua masyarakat terlayani dalam pengurusan Dokumen kependudukan	Kepala DisDuk Capil	Masih Kurangnya Personil pada Dinas dukcapil, Masih terdapat beberapa ASN DisDuk Capil yang belum memahami IT (Terkait Adminduk)	Internal	C	Tidak semua masyarakat dapat terlayani dalam pengurusan Dokumen Kependudukan.	Masyarakat, DisDuk Capil	5	5	25	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Administrasi Kependudukan				
		Terjadinya kerusakan peralatan pendukung pelayanan	Kepala DisDuk Capil	Kurangnya pemeliharaan atas peralatan kerja	Internal	C	Output dokumen terlambat diselesaikan dan masyarakat tidak puas atas pelayanan yang diterima	Masyarakat, DisDuk Capil	4	3	17	1. Pemenuhan Anggaran Pemeliharaan sesuai kebutuhan 2. Melakukan Opname terkait kualitas Barang yang tersedia.	5	5	25	

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
		Tidak dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal	Kepala DisDuk Capil	Kurangnya Fasilitas pendukung (Alat Penunjang perekaman) dan penerbitan dokumen kependudukan lainnya, Ruang pelayanan yang tidak memadai, hanya mampu menampung 30 Orang, Sistem pelayanan belum menjangkau sampai ke Desa2, Peralatan penunjang pelayanan Mobile belum tersedia.	Internal	C	Menurunya pencapaian Presentase Pengurusan Dokumen Administrasi Kependudukan tidak mencapai target sesuai waktu yang ditentukan	Masyarakat, DisDuk Capil	5	5	25	1. Pengusulan kembali pengadaan peralatan pendukung layanan administrasi kependudukan 2. Rehabilitasi gedung pelayanan 3. ,Memaksimalkan perBUP Terkait Layanan Administrasi Berbasis Desa (LABD) 4. Intensitas pelaksanaan jemput bola 5.Usulan pengadaan Mobile KTP				
		Terjadinya pengurusan oleh Calo/Perantara	Kepala DisDuk Capil	Kerangnya Kesadaran Masyarakat dalam Mengurus Kependudukan Secara Mandiri	Internal/ Eksternal	C	Masyarakat terbebani dengan biaya yang tidak semestinya dan rusaknya nama baik Perangkat /Pemerintah Daerah	Masyarakat, DisDuk Capil	5	5	25	1. Bekerja sama deng Cyber Pungli 2. Sosialisasi terkait Calo dan Pungli 3.Pemberian punishment				

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase OPD yang menerapkan e-Government	Domain pemerintah Kabupaten Bolang Mongondow tidak dapat diakses mengalami downtime/ kena hack	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengamanan Jaringan terhadap website yang lemah	Internal	C	Domain pemerintah Kabupaten Bolang Mongondow tidak dapat diakses	Kepala OPD, Instansi Pemerintah Daerah dan Stakeholder	5	5	25					
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		terputusnya koneksi jaringan	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	karena adanya kabel putus/ perangkat pendukung rusak	Internal	C	Penyimpanan data pada server tidak optimal	Kepala OPD, Instansi pemerintah Daerah	5	4	24					
		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Belum dapat dilaksanakan secara optimal	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Sumber Daya Manusia Pengelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada OPD belum terampil	Internal dan Eksternal	C	Pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada OPD belum berjalan optimal	Instansi pemerintah dan Masyarakat	5	4	24		5	4	24	
		Terjadinya gangguan pada jaringan internet	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemeliharaan jaringan/maintenance oleh provider	Internal	C	Penyimpanan data	Masyarakat								

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah data Statistik Sektoral	Sedikitnya peminat kegiatan pelatihan/peingkatan kompetensi	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Tidak tepatnya kegiatan sosialisasi kepada kelompok sasaran	Internal	C	Kegiatan pelatihan tidak terlaksana sesuai target yang diharapkan	OPD dan Instansi Pemda;	5	4	24	menyusun dan menerapkan regulasi pelatihan / peningkatan kompetensi yang wajib diikuti oleh OPD				
		Terjadinya kesalahan dalam inputing data	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Kelalaian Admin OPD dalam penginputan data	Internal	C	Kesalahan pada dokumen/ output pelayanan dan masyarakat tidak puas atas pelayanan yang diterima	Instansi Pemda; Pengguna data					5	4	24	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Keamanan Sistem Persandian	Pelayanan Jaring Komunikasi Sandi tidak optimal	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Dukungan anggaran yang kurang optimal	Internal	C	Belum optimalnya pelayanan Tanda Tangan Elektronik , surat masuk dan keluar secara elektronik	Internal OPD dan pemerintah Daerah	3	4	16	Pendaftaran pelatihan secara online oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dilakukan koordinasi secara intens	4	4	19	
		Kualifikasi SDM Persandian tidak sesuai dengan jabatan	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	pelatihan mengenai persandian yang tidak ada	Internal /Eksternal	C	Proses kegiatan persandian tidak berjalan optimal	Internal OPD dan pemerintah Daerah	4	3	17	Dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) tentang Persandian				

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat (Jika terdapat perubahan nilai risiko)
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Capaian Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	kurangnya penyebaran informasi publik kepada masyarakat	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Dukungan pelaku kehumasan dan jurnalis kurang dalam memberikan informasi terkait Kabupaten Bolaang Mongondow	Internal	C	capaian kinerja dalam menyampaikan Informasi yang tidak optimal	Pers, Pemerintah dan OPD	4	3	17	Tidak melakukan kerjasama dengan media yang kurang mempublikasi penyebaran informasi publik, aktif bekerja sama dengan media yang aktif menyebarkan informasi publik yang berkualitas				
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		terputusnya koneksi jaringan	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	karena adanya kabel putus/perangkat pendukung rusak	Internal	C	Penyimpanan data pada server tidak optimal	Kepala OPD, Instansi pemerintah Daerah	5	4	24	Dilakukan Maintenance / Pemeliharaan Jaringan Kabel Secara Berkala	4	3	17	
		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Belum dapat dilaksanakan secara optimal	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Sumber Daya Manusia Pengelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada OPD belum terampil	Internal dan Eksternal	C	Pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada OPD belum berjalan optimal	Instansi pemerintah dan Masyarakat	5	4	24	Dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) tentang Pengelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)				
		Terjadinya gangguan pada jaringan internet	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemeliharaan jaringan/maintenance oleh provider	Internal	C	Penyimpanan data	Masyarakat								

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat (Jika terdapat perubahan nilai risiko)
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah / Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah	Terjadinya keterlambatan Penginputan data dan proses pelaporan capaian realisasi pelaksanaan program kegiatan tahunan di aplikasi emonev	Kepala OPD	- Jaringan Internet yang kurang bagus - Tidak tersedianya Data - OPD kurang proaktif	Internal/ Eksternal	C	- Jaringan Internet yang kurang bagus - Tidak tersedianya Data - OPD kurang proaktif	Pemerintah Daerah	4	3	17	Dengan melaksanakan kegiatan rapat evaluasi dan fasilitasi penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pembangunan bagi OPD	4	3	17	
Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan daerah / Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capaian Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Dilaksanakan	Terjadinya keterlambatan penetapan dokumen perencanaan tahunan (RKPD)	Kepala OPD	kurangnya komitmen disiplin terhadap batas waktu penginputan	External	C	kurangnya komitmen disiplin terhadap batas waktu penginputan	Pemerintah Daerah	4	3	17	Pendampingan dan fasilitasi secara berkala dan melakukan pelaporan secara berjenjang kepada pimpinan. Membuat Roadmap dan time schedule tahapan penyusunan dokumen sesuai dengan pedoman atau kerangka acuan kerja	3	3	14	
		Kurangnya keterlibatan kelompok kerja perangkat daerah dalam penyusunan rencana aksi	Kepala OPD	Perangkat Daerah belum memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam Pokja	Internal	C	Perangkat Daerah belum memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam Pokja	Pemerintah Daerah	3	3	14	Mengaktifkan forum Koordinasi dan mengundang seluruh anggota Kelompok kerja dalam tahapan Penyusunan rencana aksi melalui rapat-rapat atau Focus Grup Discussion sekaligus dimintakan saran, masukan atau koreksi secara				

REGISTER RESIKO											Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena							
											langsung maupun tertulis				
		Laporan hasil pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pembangunan Bidang Pemerintahan, Sosial, Budaya dan Ekonomi yang di laporkan oleh perangkat daerah tidak tepat waktu	Kepala Badan	1. Jaringan Internet Lambat 2. Aplikasi dalam tahap pengembangan 3. Kurangnya keseriusan perangkat daerah	Internal/ Eksternal	C	Terhambatnya penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemerintah Daerah	3	3	14				1. Menambah Bandwitch internet 2. Menyelesaikan aplikasi yang digunakan 3. Komitmen dari perangkat daerah
		Rekomendasi dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow tidak sesuai	Kepala Badan	Kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan kurang konsisten			Capaian realisasi target penurunan angka kemiskinan tidak signifikan	Pemerintah Daerah	3	3	14				Melakukan koordinasi secara berkala dan memperkuat Kmitmen Perangkat Daerah serta melakukan validasi data dan kegiatan

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat (Jika terdapat perubahan nilai risiko)
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
		Kurangnya Koordinasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kepala Badan	Kurangnya pemahaman peran dan fungsi Pokja oleh perangkat Daerah	Internal	C	Program Bidang Perumahan dan kawasan permukiman tidak berjalan sesuai yang direncanakan	Pemerintah Daerah	4	2	13	Melaksanakan rapat Koordinasi Kelompok kerja Perumahan dan kawasan Permukiman untuk membahas isu dan permasalahan bidang PKP serta memberikan saran rekomendasi				
		Belum optimalnya koordinasi Komisi Irigasi	Kepala Badan	Fungsi kelembagaan dalam hal ini KOMIR kurang implementatif dan belum mencapai kebutuhan	Internal	C	Tidak tercapainya koordinasi dan komunikasi yang mendukung tertib pengembangan dan pengelolaan system irigasi	Pemerintah Daerah	3	2	11	Dukungan oleh sekretariat komir yang andal dan diharapkan tersusunnya konsep rumusan dan lanjut pelaksanaan kegiatan				
	Presentase Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan	Koleksi data yang kurang update atau belum diperbaharui dan kurang komprehensif, terkait peraturan dimana adanya regulasi yang sulit diimplementasikan dan saling bertentangan	Kepala Badan	Keterbatasan personil dan tidak adanya database yang mudah dimutakhirkan secara berkala	1. Internal 2. Eksternal	C	Dokumen penelitian dan pengembangan yang dihasilkan kurang komprehensif dan berkualitas	Pemerintah Daerah	3	3	14	1. Meningkatkan kualitas SDM 2. Melakukan Updating data secara berkala dan membuat kriteria serta pengelompokan data, terkait peraturan 3. Melakukan sinkronisasi peraturan serta kajian terkait kebutuhan dan kelayakan suatu peraturan terkait	3	3	14	

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
		Hasil rekomendasi/kajian belum dapat diakomodir dalam dokumen perencanaan	Kepala Badan	Rekomendasi tidak ditindak lanjuti	1. Internal 2. Eksternal	C	Dokumen perencanaan yang dihasilkan kurang memadai	Pemerintah Daerah	3	3	14	Melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap hasil rekomendasi dan memasukan hasil rekomendasi perencanaan untuk bisa diimplementasikan				
		Inovasi yang didesiminasi kan belum diadopsi maupun dilaksanakan	Kepala Badan	1. Keterlibatan SDM 2. Keterbatasan sarana dan Prasarana Pendukung	1. Internal 2. Eksternal	C	Percepatan dan akselerasi pembangunan akan melambat akibat terobosan atau inovasi tidak berjalan maksimal	Pemerintah Daerah	3	3	14	1. Meningkatkan SDM dan sarana prasarana pendukung pada perangkat daerah untuk melaksanakan inovasi dalam mencapai sasaran 2. Melaksanakan lomba inovasi daerah untuk mendorong penerapan inovasi sebagai upaya akselerasi pembangunan				
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Serta Pengawasan, Penganggaran dan Pembentukan Perda, dalam menjalankan fungsi DPRD.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan	1.1. Target Peraturan Daerah yang ditentukan berdasarkan RENSTRA tidak tercapai	Sekretariat DPRD Kab. Bolmong	1.1. Karena Kurang Focus dalam Pencapaian Target dan Banyaknya Agenda Komisi	Internal	C	Berdampak terhadap Pencapaian Kinerja Tahunan	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	3	4	16	Bapemperda melakukan Evaluasi Kinerja per Triwulan Pelaksanaan RKT Bapemperda	4	3	17	

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
	Dokumen Anggaran Setwan DPRD															
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		1.2. Peserta Terlambat Hadir kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD (Bimbingan Teknis)	Sekretariat DPRD Kab. Bolmong	1.2. Kelalaian Peserta	Internal	C	Kegiatan Bimbingan Teknis tidak terlaksana dengan baik	Anggota DPRD	4	2	13	Pimpinan DPRD menekankan kepada para Peserta Bimbingan Teknis agar Konsisten Waktu				
		1.3. Pengadaan Makan dan Minum Kegiatan Reses tidak Tepat Waktu	Sekretariat DPRD Kab. Bolmong	1.3. Kelalaian Rekanan Penyedia Makan dan Minum	Internal	C	Anggota DPRD dan Peserta tidak puas dengan jalannya kegiatan	Anggota DPRD dan Masyarakat	4	2	13	Sebelum kegiatan Reses dimulai Makanan dan Minuman sudah Tersedia				
		1.4. Pelaksanaan Paripurna / Rapat Dengar Pendapat Sering Tidak Tepat Waktu	Sekretariat DPRD Kab. Bolmong	1.4. Kehadiran Pimpinan dan Anggota DPRD tidak Tepat Waktu	Internal	UC	Peserta Paripurna / RDP (SKPD) Kejadiannya Banyak Tertunda	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	3	4	16	Pimpinan DPRD melalui Ketua - Ketua Fraksi mengkonfirmasi Anggota - Anggota Fraksi dalam Kehadiran pada Rapat Paripurna dan Rapat Dengar Pendapat				
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan BMD	Persentase perangkat daerah yang tidak ada temuan menyangkut pengelolaan keuangan oleh	Pelayanan penerbitan SP2D mengalami keterlambatan dikarenakan gangguan jaringan	Kepala BKD dan Kabid Bidang Perbendaharaan	Server masih terpusat dikementrian dalam negeri	Internal	C	SP2d tertunda dan tidak dapat diproses pada hari berkenaan	Semua OPD	4	4	19	Menambah Bandwich	4	4	19	

REGISTER RESIKO											Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat (Jika terdapat perubahan nilai risiko)	
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
	instansi pemeriksa															
Program Pengelolaan keuangan daerah		Kesalahan dalam penyetoran PFK	Kepala BKD dan Kabid Perbendaharaan	kesalahan pada pengisian jenis pajak dan tidak memperhatikan batas waktu kadaluarsa pada ID Billing pajak	Internal	C	Penyetoran pajak (PFK) yang disetor ke kas negara tidak sesuai	BKD dan OPD terkait	4	4	19	Buatlah buku kontrol terkait besaran potongan pajak dan batas waktu penyetoran.				
		Tahapan penyusunan KUA - PPAS tidak sesuai jadwal	Kepala BKD dan Kabid Anggaran	1. terlambat pengumpulan data dan informasi 2. keterbatasan SDM dan teknologi 3. perubahan kebijakan yang terjadi ditengah proses penyusunan KUA PPAS	Internal	C	sanksi /Punishment kepala daerah dan ketua DPRD tidak menerima gaji	TAPD /Kepala OPD	4	4	19	1. Menentukan jadwal serta memperhatikan waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahapan penyusunan KUA PPAS. 2 memiliki sistim monitoring dan evaluasi yang baik untuk memastikan tahapan penyusunan KUA PPAS berjalan sesuai jadwal.				
		Double Pencairan	Kepala BKD dan Kabid Anggaran	1.kelalaian dari pihak bidang Perbendaharaan 2. lemahnya pengawasan terkait pencairan dana dari pihak Bank.3. pengujian kas tidak dilakukan	Internal	C	1. Laporan Keuangan . 2. Dana tidak dapat dipertanggungjawabkan	Pemda BM	4	4	19	1. SOP. 2. Pengelolaan Kas yang lebih baik lagi. 3. Tingkatkan pengawasan terkait dana yang keluar dari kas daerah /rekon kas.4. Sanksi				

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
	Persentase Nilai aset yang tidak bermasalah	kesalahan pencatatan BMD	Kepala BKD dan Kabid pengelolaan BMD	Pencatatan aset yang tidak teridentifikasi / gelondongan	Internal	C	1.Nilai aset tidak diketahui 2.Opini BPK terkait neraca aset	Kepala OPD	5	5	25	1.Peningkatan pengetahuan SDM terkait pengelolaan BMD. 2. setiap belanja pengadaan belanja modal segera lakukan pencatatan dan pendokumentasian serta buat BA pemegang barang				
Program Pengelolaan BMD		Tanah belum bersertifikat	Kepala BKD dan Kabid pengelolaan BMD	1.BPN belum melakukan pengukuran 2. Kurangnya dana yang tersedia untuk pembuatan sertifikat	eksternal / internal	C	1.Tanah pemda yang belum bersertifikat 2. mudah dikuasai pihak lain	Pemda BM	5	5	25	Pengalokasian dana yang cukup untuk pembuatan sertifikat tanah	4	5	22	
		kendis yang masih dikuasai pihak lain	Kepala BKD dan Kabid pengelolaan BMD	pemegang aset tidak mau menyerahkan	eksternal	UC	aset belum bisa dikuasai pemda	Pemda BM	5	5	25	Suket tidak memegang aset bagi ASN yang akan pensiun				
		bangunan yang belum dicatat	Kepala BKD dan Kabid pengelolaan BMD	belum ada penilaian dari KPKnL	eksternal	UC	Nilai bangunan belum diketahui	Pemda BM	3	4	16	Menyurat kembali ke KPKnL terkait penilaian aset				

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
Program Pengelolaan Pendapatan daerah	Persentase Peningkatan PAD	Potensi pajak daerah belum optimal	Kepala BKD dan Kabid Perimbangan, Pendataan dan Pendaftaran	Pengelolaan data wajib pajak tidak dikelola secara memadai	internal	C	PAD tidak optimal	Kepala OPD	3	5	18	Menambah pengetahuan dengan mengikuti bimtek terkait perpajakan serta mengadakan sistem perpajakan yang sudah online untuk basis database wajib pajak				
		Piutang pajak tidak tertagih	Kepala BKD dan Kabid Penagihan dan Keberatan	Wajib pajak tidak mau ditagih	internal	C	ada potensi kekurangan pendapatan	Kepala OPD	3	5	18	1.melibatkan instansi lain atau stakeholder dalam memberikan pelayanan untuk memverifikasi wajib pajak yang belum melakukan pembayaran. 2 melakukan follow up terhadap piutang yg belum dibayarkan kepada pihak bersangkutan. 3. tagih lebih agresif dan berikan surat teguran	3	5	18	
		Database wajib pajak tidak sesuai dengan data dilapangan	Kepala BKD dan kabid Perimbangan, pendataan dan pendaftaran	Terdapat penolakan untuk menjadi wajib pajak	Eksternal	C	PAD tidak optimal	kepala OPD	3	5	18	1.Pengendalian aplikasi untuk semua data base pajak yang sudah terintegrasi. 2 mendata kembali wajib pajak / lakukan rekon				
Program kepegawaian daerah	Indeks profesionalitas ASN	Penyalahgunaan wewenang/jabatan	Kepala OPD	Intervensi /Penempatan tidak sesuai kompetensi	Internal dan Eksternal	C	Konsekuensi tuntutan pelanggaran tentang kepegawaian dan	ASN yang telah memenuhi persyaratan	4	3	17	Membuat kebijakan tentang kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar	4	3	17	

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
							aturan yg terkait									
		pengadaan CASN yang tidak sesuai formasi yang diburuhkan Daerah	Kepala OPD	1. Tidak Terpenuhinya formasi CASN sesuai kebutuhan 2. Adanya fraud oknum tertentu	Internal dan Eksternal	C	Melakukan koordinasi serta monitoring dan evaluasi atas kebutuhan CASN sesuai kebutuhan daerah	Kepala OPD, Kepala Bidang/ASN	4	2	13	Melakukan koordinasi serta monitoring dan evaluasi atas kebutuhan CASN sesuai kebutuhan daerah				
		Tidak terpenuhinya formasi CASN sesuai kebutuhan	Kepala OPD	CASN tidak dapat memenuhi standar kompetensi	Internal dan Eksternal	C	Terhambanya kinerja organisasi dan Target kebutuhan CASN daerah tidak tercapai	Kepala OPD, Kepala Bidang/ASN	3	2	11	Melakukan koordinasi serta monitoring dan evaluasi atas kebutuhan CASN sesuai kebutuhan daerah				
		Jabatan tidak sesuai kompetensi	Kepala OPD	Intervensi dan/atau pelanggaran standar penempatan jabatan	Internal dan Eksternal	C	1. Kinerja aparatur pemerintah tidak tercapai. 2. Munculnya paradigma negatif masyarakat	Kepala OPD, Kepala Bidang/ASN	4	3	17	1. Membuat regulasi SK /Juknis seleksi jabatan 2. Melakukan seleksi jabatan sesuai SOP.				

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
Program pengembangan sumber daya manusia	Rasio pengembangan kompetensi	Rendahnya tingkat kinerja aparatur sipil negara	Kepala OPD	Terbatasnya sumber daya aparatur sipil negara yang kompeten	Internal dan Eksternal	C	Tidak tercapainya tujuan dan sasaran program	Pemerintah daerah dan ASN	2	2	7	Menyusun daftar urutan pegawai yang akan mengikuti diklat melalui uji kompetensi				
		Persentase capaian SDM yg kompetensi belum maksimal	Kepala OPD	Kuantitas yang tersedia untuk peningkatan SDM terbatas	Internal dan Eksternal	C	adanya stigma negatif masyarakat atas rendahnya SDM ASN	Pemerintah Daerah, Kepala OPD dan Masyarakat	2	2	7	Melakukan koordinasi dan sosialisasi rekrutmen pengembangan SDM	2	2	7	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Lumbung Pangan Yang memadai berdasarkan Jumlah kecamatan	Lokasi pembangunan lumbung tidak tersedia	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Tidak Maksimalnya Identifikasi dan Verifikasi di Lapangan	Internal	C	Pembangunan lumbung pangan tidak dapat dibangun	Masyarakat	4	3	17	Memberikan Bantuan kepada kelompok yang siap	4	3	17	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi	Kurangnya Penganekaragaman Pangan sesuai ketersediaan pangan di daerah	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pengolahan pangan yang Beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	Eksternal/Internal	C	Tidak tercapainya angka kecukupan Gizi (AKG) makanya terjadinya Gizi Buruk dan Stunting	Masyarakat	4	2	13	Memberikan Penyuluhan Kepada Kelompok Penerima Bantuan (KWT) agar dapat memaksimalkan Bantuan yang sudah diberikan	4	2	13	
		Terjadi Fluktuasi Harga	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Kurangnya Ketersediaan bahan Pangan	Eksternal	C	Kurangnya Daya Beli Masyarakat	Masyarakat	4	2	13	Penyediaan Stok Bahan Pangan				

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	Penjelasan Inspektorat (Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	Data Penerima Bantuan tidak akurat	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Tidak dilakukan Validasi Data penerima bantuan	Internal	C	Bantuan diserahkan tidak tepat sasaran	Masyarakat	4	2	13	Pelaksanaan Operasi Pasar	4	2	13	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang lolos uji keamanannya di laboratorium	Kurangnya SDM Petugas Pengambil Contoh (PPC) /Sampel yang akan diuji	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Kurangnya Dana dan Petugas / Pegawai	Internal	C	Pengambilan contoh pangan segar asal tumbuhan (PSAT) tidak Maksimal	Masyarakat	4	2	13	Menambah SDM untuk melakukan validasi data penerima bantuan	4	2	13	
											Diperlukan pelatihan terkait validasi data					
											Membuat Data Base Penerima Bantuan					
Tersedianya Varietas Benih/Bibit yang Bersertifikat	Tersedianya Varietas Benih/Bibit yang Bersertifikat	Penyaluran Bantuan benih tidak tepat waktu	Kepala Dinas Pertanian	Keterlambatan penyaluran benih dari pihak penyedia	Eksternal	C	Penyedia tidak dapat memenuhi permintaan Dinas Pertanian	Kelompok Tani	3	4	16		3	4	16	
		Bantuan tidak tepat sasaran	Kepala Dinas Pertanian	Pelaksana/PL tidak melakukan verifikasi data CPCL	Internal	C	Terdapat calon penerima bantuan yang fiktif	Kelompok Tani	3	4	16					
		Penyimpangan Penggunaan Bantuan Pertanian	Kepala Dinas Pertanian	Kelalaian penerima bantuan	Eksternal	C	Bantuan tidak bermanfaat dan terjadinya pemborosan	Kelompok Tani	3	4	16					

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	Penjelasan Inspektorat (Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
							keuangan daerah									
	Terselenggaranya Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pekerjaan bukan dilaksanakan oleh rekanan pemenang	Kepala Dinas Pertanian	Kelalaian Pihak Penyedia	Eksternal	C	Kualitas pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dan terjadinya kerugian keuangan daerah	Pemda, Petani	4	2	13	Pemilihan rekanan yang sudah berpengalaman dan kompeten dalam melaksanakan pekerjaan/kegiatan				
		Keterlambatan penyelesaian pekerjaan	Kepala Dinas Pertanian	Kelalaian Pihak Penyedia	Eksternal	C	Pekerjaan tidak selesai dan kerugian keuangan daerah	Petani	3	3	14					
		Rekanan tidak mengerjakan sesuai spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak	Kepala Dinas Pertanian	Kelalaian Pihak Penyedia	Eksternal	C	Kualitas pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dan terjadinya kerugian keuangan daerah	Pemda, Petani	2	3	10		3	3	14	
		Pihak penyedia melakukan wanprestasi	Kepala Dinas Pertanian	Kelalaian Pihak Penyedia	Eksternal	C	Pekerjaan tidak selesai dan kerugian keuangan daerah	Pemda, Petani	4	3	17	Pelaksana teknis pekerjaan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala mengenai progress kegiatan, dan langsung melaporkan kepada pimpinan				

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	(Jika terdapat perubahan nilai risiko)
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
		Terjadinya ketelambatan realisasi laporan kegiatan secara bertahap (untuk pancairan dana tahap selanjutnya)	Kepala Dinas Pertanian	Kelalaian Pelaksana dalam menginput laporan	Internal	C	Dana dari pemerintah pusat tidak bisa dicairkan dan menjadi beban hutang daerah kepada pelaksana walaupun [pekerjaan telah selesai	Petani	2	3	10					
	Terselenggaranya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Terjadinya kerusakan peralatan pendukung pelayanan	Kepala Dinas Pertanian	Kurangnya pemeliharaan atas peralatan kerja	Internal	C	Output dokumen terlambat diselesaikan dan masyarakat tidak puas atas pelayanan yang diterima	Masyarakat	4	2	13		3	2	13	
		Terjadinya gangguan pada aliran listrik	Kepala Dinas Pertanian	Gangguan Listrik	Internal	C	Output terlambat diselesaikan dan masyarakat tidak puas atas pelayanan yang diterima	Masyarakat	2	1	3					

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat (Jika terdapat perubahan nilai risiko)
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit		
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
	Terselenggaranya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Informasi/Laporan kejadian serangan organisme pengganggu tanaman tidak disampaikan ke petugas	Kepala Dinas Pertanian	Kurangnya pemahaman dan komunikasi antara petani dengan petugas	Eksternal	C	Petani gagal panen dan kegiatan pada dinas pertanian tidak berjalan	Petani	2	1	3	2	1	3		
	Terselenggaranya penyuluhan pertanian	Sedikitnya peminat kegiatan pelatihan/peningkatan kompetensi	Kepala Dinas Pertanian	Tidak tepatnya kegiatan sosialisasi kepada kelompok sasaran	Eksternal	C	Kegiatan pelatihan tidak terlaksana	Petani	2	1	3					
		Peserta yang sudah mendaftar tidak hadir	Kepala Dinas Pertanian	Kelalaian calon peserta	Internal/ Eksternal	C	Terjadinya pemborosan keuangan negara/daerah	Petani	2	2	7	2	2	7		
		Jalannya kegiatan tidak sesuai rencana	Kepala Dinas Pertanian	Kelalaian Panitia Kegiatan	Internal/ Eksternal	C	Peserta tidak/kurang memahami materi yang disampaikan	Petani	2	2	7					
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Laju pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	Terbatasnya ketersediaan hasil produksi perikanan tangkap yang dikelola	Kepala Dinas	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap	1. Internal 2. External	C	Terjadinya penurunan produksi perikanan tangkap dan naiknya harga komoditi perikanan	1. Pemerintah Daerah 2. Masyarakat	3	4	16	3	4	16	1. Menambah sarana dan prasarana perikanan tangkap 2. Melaksanakan Sosialisasi/Pelatihan 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi	

REGISTER RESIKO												Rencana Tindak Pengendalian	KOMPOSIT RISIKO			Penjelasan Inspektorat (Jika terdapat perubahan nilai risiko)
Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit	
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Angka Produksi Perikanan Budidaya	Keterbatasan Produksi perikanan budidaya	Kepala Dinas	Angka Produksi Perikanan Budidaya	1. Internal 2. External	C	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung perikanan budidaya	1. Pemerintah Daerah 2. Masyarakat	3	4	16	Memberikan pelatihan cara pembuatan pakan ikan, sosialisasi cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan cara pembenihan ikan nila / ikan mas	3	4	16	
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Jenis Produksi Olahan Hasil Perikanan	Terbatasnya ketersediaan produk olahan perikanan dipasaran	Kepala Dinas	Kurangnya ketersediaan bahan baku, sarana dan prasarana serta terbatasnya pengolahan produk perikanan	1. Internal 2. External	C	Terjadinya penurunan hasil olahan perikanan	1. Pemerintah Daerah 2. Masyarakat	3	4	16	1. Meningkatkan Ketersediaan Bahan Baku 2. Menambah sarana dan prasarana Pendukung, 3. Memaksimalkan Kelompok Pengolah Produk Perikanan	3	4	16	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	INSPEKTUR DAERAH	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	